

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT
PENDIDIKAN, PENDAPATAN, NORMA SOSIAL, SANKSI
PAJAK, DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Disusun oleh :

**LESTA NOFITA
NPM : 160412030**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, NORMA SOSIAL, SANKSI PAJAK, DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun oleh :

**LESTA NOFITA
NPM : 160412030**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN,
PENDAPATAN, NORMA SOSIAL, SANKSI PAJAK, KEPERCAYAAN
PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAAN DAN PERKOTAAN(PBB-P2) DI
DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh :

**LESTA NOFITA
NPM. 160412030**

telah diperiksa dan disetujui
oleh komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 25 Agustus 2020

PEMBIMBING I



Diskhamarzaweny, SE., MM
NIDN. 1012038701

PEMBIMBING II



Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

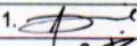
**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT
PENDIDIKAN, PENDAPATAN, NORMA SOSIAL, SANKSI PAJAK,
KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN
PERKOTAAN(PBB-P2) DI DESA BUKIT PEDUSUNAN
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh:

**LESTA NOFITA
NPM. 160412030**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal 06 September 2020
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

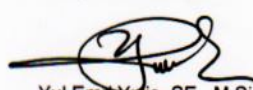
No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE., ME	Ketua	1. 
2	Rina Andriani, SE., Msi	Sekretaris	2. 
3	Dishkamarzaweny, SE., MM	Anggota 1	3. 
4	Yul Emri Yulis, SE., Msi	Anggota 2	4. 
5	M. Irwan, SE., MM	Anggota 3	5. 
6	Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak	Anggota 4	6. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Ketua
Program Studi Akuntansi


Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lesta Nofita
NPM : 160412030
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelarakademik suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 6 September 2020
Yang membuat pernyataan



Lesta Nofita
Lesta Nofita
160412030

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Alla SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan sebagai Dosen pembimbing I yang juga telah meluangkan waktunya dalam membimbing peneliti
3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi dan pembimbing II yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
4. Ibu **Diskhamarzaweny, SE., MM** selaku pembimbing I yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
5. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswi.
7. Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
8. Kedua orang Tuaku tercinta, Ayahanda **Mohd. Rimis** dan Ibunda **Yurniati** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, abang **Mhd. Rizwan** dan adek **M.yusril**, serta suami tercinta **Okva Randi**, semoga penulis mampu menjadi apa yang mereka harapkan.
9. Rekan seperjuangan Santi, Sela, Novi, dan Elva Terima kasih atas motivasinya selama ini, bahu membahu dan saling membantu satu sama lain.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti, bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini.

Teluk Kuantan, 6 September 2020
Peneliti



Lesta Nofita
160412030

ABSTRAK

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Lesta Nofita
Diskhamarzaweny
Yul Emri Yulis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, pendapatan, norma sosial, sanksi pajak dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Data penelitian ini diperoleh dari data kuesioner (primer). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang menerima SPPT-PBB tahun 2019 di desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 473 wajib pajak yang menerima SPPT-PBB. Metode pengambilan sampel *Purposive Sampling* diperoleh 83 sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan uji t dan koefisien determinasi. Alat uji yang digunakan yaitu SPSS versi 20.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar -0,153. Kedua, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,577. Ketiga, pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,624. Keempat, norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar -0,038. Kelima, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,590. Keenam, kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar -0,041. Diperoleh Koefisiensi Determinasi sebesar 0,206 atau sama dengan 20,6% yang artinya besarnya kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, pendapatan, norma sosial, sanksi pajak dan kepercayaan pada pemerintah adalah 20,6% sedangkan 79,5% sisanya yaitu dijelaskan oleh penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, Kepercayaan pada Pemerintah, Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

Effects of Taxpayer Awareness, Education Level, Income, Social Norms, Tax Sanctions, and trust in the government towards Compliance Paying Land and Building Taxes in Rural and Urban Areas (PBB-P2) in Bukit Pedusunan Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency

Lesta Nofita
Diskhamarzeweny
Yul Emri Yulis

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, education level, income, social norms, tax sanctions and trust in the government towards compliance with paying land and building tax in rural and urban areas (PBB-P2) in Bukit Pedusunan Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The research data was obtained from questionnaire data (primary). The population in this study were all taxpayers who received the SPPT-PBB 2019 in the village of Bukit Pedusunan, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi District, totaling 473 taxpayers who received the SPPT-PBB. The Purposive Sampling method was obtained 83 samples. This study uses a quantitative approach. The analysis used is multiple linear regression analysis, with t test and coefficient of determination. The test tool used is SPSS version 20.

Research results show that, first of all taxpayer awareness has a negative and significant effect on compliance with paying land and building taxes of 0.153. Second, the level of education has a positive and significant effect on compliance with paying land and building taxes of 0.577. Third, income has a positive and significant effect on compliance with paying land and building taxes of 0.624. Fourth, social norms have a negative and significant effect on compliance with paying land and building taxes of -0,038. Fifth, tax sanctions have a positive and significant effect on compliance with paying land and building taxes of 0.590. Sixth, trust in the government has a negative and significant effect on compliance with paying land and building taxes of -0,041. Determination coefficient obtained by 0.206 or equal to 20.6% which means the amount of taxpayer awareness, education level, income, social norms, tax sanctions and trust in the government is 20.6% while the remaining 79.5% is explained by other causes derived from outside the regression that was not examined in this study.

Keywords: *Awareness of Taxpayers, Education Level, Income, Social Norms, Tax Sanctions, Trust in Government, Compliance in Paying Land and Building Taxes.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Kepatuhan Membayar Pajak	15
2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak	18
2.1.3 Tingkat Pendidikan	20
2.1.4 Pendapatan	24
2.1.5 Norma Sosial	25
2.1.6 Sanksi Pajak	27
2.1.7 Kepercayaan Pada Pemerintah	28
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Pengembangan Hipotesis	34

2.3.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.....	34
2.3.2	PengaruhTingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.....	35
2.3.3	Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	37
2.3.4	Pengaruh Norma sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	38
2.3.5	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	39
2.3.6	Pengaruh Kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.....	40
2.4	Kerangka Pemikiran	41
2.5	Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN.....		43
3.1	Rancangan Penelitian	43
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.2.1	Tempat Penelitian.....	43
3.2.2	Waktu Penelitian.....	43
3.3	Populasi dan Sampel.....	44
3.3.1	Populasi.....	44
3.3.2	Sampel	44
3.4	Jenis dan Sumber Data	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data.	46
3.6	Instrumen Penelitian.....	47
3.6.1	Variabel Penelitian.....	46
3.6.2	Definisi Operasional.....	49
3.7	Instrumen Penelitian.....	51

3.8 Analisis Data	52
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	52
3.8.2 Uji Kualitas Data	52
3.8.3 Uji Asumsi Klasik	53
3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda	56
3.8.5 Uji Hipotesis.....	57
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	59
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	59
4.1.1 Letak dan Luas Wilayah	60
4.1.2 Iklim dan Curah Hujan	60
4.1.3 Jumlah penduduk	61
4.1.4 Hidrografi	61
4.1.5 Sejarah Desa Bukit Pedusunan	62
4.1.6 Demografi	63
4.1.7 Keadaan Sosial	63
4.1.8 Keadaan Ekonomi	65
4.1.9 Pemerintahan Desa Bukit Pedusunan	65
4.1.10 Deskripsi Responden.....	68
4.1.11 Karakteristik Responden.....	68
4.2 Hasil Penelitian.....	72
4.2.1 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	72
4.2.1.1 Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	72
4.2.1.2 Variabel Tingkat Pendidikan (X_2).....	74
4.2.1.3 Variabel Pendapatan (X_3).....	76
4.2.1.4 Variabel Norma Sosial (X_4).....	78
4.2.1.5 Variabel Sanksi Pajak (X_5)	81
4.2.1.6 Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X_6).....	83
4.2.1.7 Variabel Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)	85
4.2.2 Uji Kualitas Data	87
4.2.2.1 Uji Validitas	87
4.2.2.2 Uji Reliabilitas	89
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	90
4.2.3.1 Uji Normalitas.....	90

4.2.3.2 Uji Multikolineritas	90
4.2.3.3 Uji heteroskedastisitas	92
4.2.3.4 Uji Autokorelasi	93
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	94
4.2.4.1 Persamaan Regresi	94
4.2.5 Uji Hipotesis.....	97
4.2.5.1 Uji <i>t</i>	97
4.2.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)	100
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	102
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.....	102
4.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.....	104
4.3.3 Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.....	106
4.3.4 Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.....	107
4.3.5 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.....	108
4.3.6 Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.....	109
5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi Pembayaran PBB Desa Bukit Pedusunan.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu	30
3.1 Jadwal Penelitian	44
3.2 Definisi Operasional	49
4.1 Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi	61
4.2 Jumlah Penduduk Desa	63
4.3 Tingkat Pendidikan	64
4.4 Mata Pencarian	64
4.5 Pemilikan Ternak.....	64
4.6 Prasarana Desa	65
4.7 Deskriptif Kuesioner	69
4.8 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	69
4.9 Karakteristik Responden berdasarkan Umur	69
4.10 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan	70
4.11 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	71
4.12 Karakteristik Responden berdasarkan pendapatan	71
4.13 Tanggapan Responden pada Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)..	73
4.14 Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Desa (X_2)	75
4.15 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pendapatan (X_3)	77
4.16 Tanggapan Responden Terhadap Norma Sosial (X_4).....	79
4.17 Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak (X_5).....	82
4.18 Tanggapan Responden Terhadap Kepercayaan pada Pemerintah (X_6)	83
4.19 Tanggapan Responden Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)	86
4.20 Uji Validitas	88
4.21 Hasil Uji Reliabilitas	89
4.22 Uji Multikolineritas	91
4.23 Uji Autokorelasi	94
4.24 Koefisien Regresi Berganda.....	95
4.25 Nilai Koefisien t	97

4.26	Uji t.....	97
4.27	Nilai Koefisien Determinasi (R^2).....	101

DAFTAR GAMBAR

Tabel		Halaman
2.1	Kerangka pemikiran	41
4.1	Sruktur Organisasi Desa Bukit Pedusunan.....	68
4.2	Uji Normalitas	90
4.3	Grafik Histogram	91
4.4	Uji Heteroskedastisitas	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian	118
LAMPIRAN 2 Tabulasi Data Penelitian	124
LAMPIRAN 3 Hasil Statistik Deskriptif	145
LAMPIRAN 4 Hasil Uji Validitas	148
LAMPIRAN 5 Hasil Uji Reliabilitas	157
LAMPIRAN 6 uji Hipotesis	161
LAMPIRAN 7 Surat Balasan Riset	
LAMPIRAN 8 Surat Keterangan Penelitian	
LAMPIRAN 9 Kartu Bimbingan Skripsi	
LAMPIRAN 10 Biodata	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana penerimaan pajak ini menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Karena merupakan penerimaan terbesar/tertinggi, pajak menjadi sumber pendanaan pembangunan yang paling besar pula. Terdapat beberapa jenis pajak yaitu PBB, PPN, PPn BM, dan PPh. Dari berbagai macam pajak tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembiayaan pembangunan. Karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah untuk pembangunan daerah dan otonomi daerah.

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan suatu negara yaitu berasal dari pajak. Pajak di Indonesia, merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial, oleh karena itu pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan negara. Untuk hal ini pemerintah diharapkan untuk mengelola pajak dengan baik agar terwujud pembangunan yang maksimal, selain itu peran dari masyarakat juga sangat diperlukan agar terwujudnya pembangunan nasional.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan setor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan (Hasra, 2007:1). Objek Pajak PBB yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk dipantau (Karnanto, 2006:36). Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan (Suhardito dan Sudibyo, 1999:3). Bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan.

Pemerintah sejauh ini terus melakukan perubahan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. Salah satu dari usaha pemerintah adalah dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan pajak dan

reformasi administrasi. Salah satu dari perubahan yang dilakukan pemerintah adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni UU No. 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal 1 Januari 2010 dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengelolaanya.

Selama ini di Indonesia PBB-P2 adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang kemudian hasilnya disetorkan ke rekening kas negara yang kemudian dikembalikan lagi kepada daerah. Setelah diterbitkannya Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 15 September 2009 wewenang pemungutan PBB-P2 dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan PBB-P2 Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk mengelola keuangan daerah mereka sendiri dan bisa mengoptimalkan pendapatan yang maksimal dari segi perpajakan.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Ditinjau dari aspek ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat/perusahaan ke sektor publik/negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Sistem pemungutan pajak yang mudah dan

didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak, merupakan impian setiap pemerintahan.

Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi Negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional (Imaniyah dan Handayani, 2008:2). Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak

Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Berikut data realisasi pembayaran PBB-P2 di Desa Bukit Pedusunan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Realisasi Pembayaran PBB Desa Bukit Pedusunan

No	Tahun	Pokok Ketetapan		Realisasi Pokok Ketetapan			Sisa Pokok Ketetapan		
		SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT	Jumlah (Rp)	%	SPPT	Jumlah (Rp)	%
1	2014	476	9.058.459	95	2.027.789	22,4	381	7.030.670	77,6
2	2015	477	9.026.859	60	1.042.240	11,5	417	7.984.439	88,5
3	2016	480	10.244.181	111	2.400.661	23,4	369	7.843.520	76,6
4	2017	471	10.156.979	127	2.865.998	28,2	344	7.290.981	71,8
5	2018	468	10.392.415	134	2.911.705	28	334	7.480.710	72
6	2019	473	10.649.998	120	2.736.784	25,7	353	7.913.214	74,3

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas terlihat rendahnya masyarakat Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang membayar pajak bumi bangunan, dari tahun 2014 – 2019 realisasi tidak mencapai 30% dari jumlah pokok ketetapan. Hal ini menunjukkan lebih dari 70% masyarakat tidak membayar pajak. Dalam pemungutan pajak bumi bangunan setiap desa menunjuk satu orang kolektor sebagai pengumpul pajak, petugas tersebut hanya memberikan surat yang berisi jumlah pajak yang kan dibayarkan tanpa tau bagaimana cara untuk mengetahui perhitungan jumlah pajak yang menghasilkan jumlah tersebut, prosedur pembayaran PBB-P2 pihak dinas pendapatan memberikan SPPT kepada pihak desa dan desa memberikan nya kepada masyarakat, lalu masyarakat membayar ke pihak pemerintah desa yang ditunjuk sebagai kolektor pemerintah desa untuk membayarkannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Febriani Ramadani Juwanti (2017) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah dan Sanksi Pajak dalam

Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar). Pada penelitian tersebut menghasilkan Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan, norma sosial pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan, kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Febriani Ramadani Juwanti (2017) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak membayar Bumi dan Bangunan, setinggi apapun tingkat kesadaran wajib pajak itu tidak akan mempengaruhi mereka untuk membayar pajak. Hal ini bisa saja dikarenakan wajib pajak belum begitu paham tentang perpajakan. Wajib pajak belum paham bahwa hasil dari pengelolaan PBB dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan daerah, Selain itu, tingkat penghasilan yang rendah menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak. Wajib pajak sadar dan tahu bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, namun penghasilan mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Namun menurut Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak membayar pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak

maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut Reza Demawan (2015) tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Masyarakat yang pendidikannya tinggi tidak akan menemui kesulitan dalam hal ini pentingnya konsep dasar perpajakan, dan untuk masyarakat yang berpendidikan rendah inilah seharusnya petugas pajak harus lebih efektif lagi dalam bersosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang arti pentingnya konsep dasar perpajakan di Indonesia. Namun menurut Arif Rahman (2018) tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena Hal ini bisa disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak tersebut dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana mereka akan lebih paham dengan sanksi yang diberikan jika melakukan kelalaian dalam membayar pajak, sehingga akan mudah baginya untuk melakukan penghindaran dan penyelewengan dalam membayar pajak.

Menurut Reza Demawan (2015) tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban.

Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya, namun menurut Arif Rahman (2018) Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar faktor yang digunakan dalam penelitian ini, mungkin juga mereka menganggap bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabat negara karena banyak kasus korupsi berhubungan dengan uang pajak yang seharusnya adalah untuk kemakmuran rakyat tetapi diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri. Hal ini juga yang menyebabkan wajib pajak dengan berpenghasilan tinggi enggan membayar pajak.

Menurut Febriani Ramadani Juwanti (2017) Norma sosial pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan bahwa norma sosial tidak berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial juga dipengaruhi oleh sikap berperilaku dan norma subjektif untuk dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, artinya norma sosial yang berkembang di masyarakat tidak menentukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena masyarakat cenderung berperilaku sesuai dengan kelompok yang ada di sekitarnya,

Menurut Febriani Ramadani Juwanti (2017) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan, artinya ketika sanksi pajak diberlakukan untuk wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, sedangkan wajib pajak itu sendiri bersikap acuh tak acuh dan tidak

merasa takut atau terbebani terhadap sanksi tersebut maka penerapan sanksi pajak bukan merupakan jaminan untuk dapat meningkatkan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun menurut Sujatmiko Dwi Setiono (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Hal ini disebabkan karena rata-rata wajib pajak di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, oleh karena itu wajib pajak mengerti akan sanksi yang diterima jika tidak patuh membayar pajak. Angka kepatuhan pembayaran pajak PBB di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman tinggi dikarenakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak PBB di kecamatan ini telah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Menurut Febriani Ramadani Juwanti (2017) Kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum menunjukkan hasil yang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, Sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan sikap aparat pemerintah dengan menegakkan kedisiplinan dan budaya berperilaku jujur dan perbaikan sistem hukum yang ada dengan pemberantasan ketidakadilan sehingga mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum. Namun menurut Sujatmiko Dwi Setiono (2018) menyatakan bahwa Tingkat Kepercayaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak. Pada penelitian ini, tingkat kepercayaan pada

sistem pemerintahan dan hukum yang cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator mayoritas responden cenderung setuju sistem pemerintahan yang ada sudah berjalan dengan baik. Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik, keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Febriani Ramadani Juwanti (2017) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah dan Sanksi Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Febriani Ramadani Juwanti (2017), terletak pada variabel yang digunakan. Dalam penelitian Febriani Ramadani Juwanti (2017) menggunakan 5 variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Norma Sosial (X_3), Kepercayaan pada Pemerintah (X_4), dan sanksi pajak (X_5) dan 1 variabel dependen yaitu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 6 variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Tingkat Pendidikan (X_2), Pendapatan (X_3), Sosial (X_4), sanksi pajak (X_5), kepercayaan pada pemerintah (X_6), dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Y). Peneliti menambah variabel pendapatan serta tingkat pendidikan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apa sajakah yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan, sehingga penulis memilih judul: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?
4. Apakah Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-

P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?

5. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?
6. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Untuk mengetahui pengaruh Norma Sosial terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun Manfaat teoritis penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran lewat hasil penelitian ini terhadap desa mengenai Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Sebagai informasi/saran bagi pihak desa terutama yang menangani Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan BangunanPerdesaan dan Perkotaandi Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ini.
3. Sebagai masukan agar dapat meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun Manfaat praktis penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam bidang Akuntansi khususnya mengenai kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Pengembangan ilmu akuntansi, diharapkan dapat dikembangkan lagi pada penelitian berikutnya baik dalam unit yang sama atau berbeda.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Membayar Pajak

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.” (Soemitro, 2008 :1)

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah suka menurut perintah, taat pada aturan atau perintah, bedisiplin. Jadi kepatuhan adalah ketaatan, patuh, tunduk dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *sistem self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Rahayu, 2010 : 137-138)

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2017 : 193)

Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. kepatuhan perpajakan dibagi menjadi (Rahayu, 2017 : 193):

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. ketentuan formal ini terdiri dari :

- a. tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP
- b. tepat waktu dalam menyetor pajak terutang
- c. tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. ketentuan material ini terdiri dari :

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak menjelaskan bahwa : “Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. (dalam Rahayu, 2010 : 138)

Menurut Safri Nurmantu Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (dalam Rahayu, 2010 : 138)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2010 : 138) yaitu:

1. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
2. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
3. Faktor pelayanan aparat pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari saksi-saksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.

5. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas, Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. (Vanesa dan Hari, 2009 : 14)

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Safri Numatu, 2005 : 103)

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2010 :143)

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di

dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior*. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting (Rahayu, 2010:144)

Adapun indikator dalam mengukur tingkat Kesadaran Wajib Pajak yaitu (Rahayu, 2010:144):

1. Kesadaran akan fungsi pajak

Kesadaran akan fungsi pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan

Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak dengan sendirinya menaati ketentuan perpajakan bukan karena paksaan karena sanksi atau hal apapun.

3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan

Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui manfaat pajak yang dibayarkannya.

4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang

Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak diatur undang-undang sehingga kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang.

2.1.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan berasal dari bahasa *paedagogire*, yang berarti membimbing anak, agar anak menjadi dan berbuat sebagai mana mestinya. Karena pada dasarnya pendidikan adalah suatu usaha mewariskan suatu kebudayaan atau warisan sosial kepada generasi berikutnya, sehingga pendidikan merupakan suatu cara melangsungkan kehidupan bagi bangsa dan Negara. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan bathin, karakter), pikiran (intektual) dan jasmani. Dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003, menyebutkan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman dalam pengajaran (UUSPN No. 2 Tahun 1989), atau tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (UUSPN No.20 Tahun 2003). Di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional disebutkan juga bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi.

Adapun indikator tingkat pendidikan yaitu (Nomor 20 tahun 2003) :

1. Pendidikan dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dasar disebut sekolah dasar (SD) yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik. berikut pengertian pendidikan dasar termaktub Dalam undang – undang sistem pendidikan nasional bab VI pasal 17 menyebutkan: Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat.

Dalam pendidikan ini akan terjadi peletakan dasar dari pembangunan manusia. Esensi pendidikan yang dialami oleh manusia pada permulaan hidup lebih ditekankan pada fakta dan membaca fakta – fakta dalam pergelaran obyektifitas di alam ini. Maka dalam pendidikan dasar, orang tua tidak boleh bertengkar atau berbuat apa saja yang belum pantas diketahui oleh anak, sebab hal itu akan merusak sistem dan suasana hati yang sedang dibangun, karena alam ini tertib, maka rumah tangga serta lingkungannya harus tertib.

2. Pendidikan menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Jenis pendidikan menengah :

1. Pendidikan menengah umum

Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas (SMA) (sempat dikenal dengan "sekolah menengah umum" atau SMU) atau madrasah aliyah (MA). Pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat. Pendidikan menengah umum terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

2. Pendidikan menengah kejuruan

Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan (SMK) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK). Pendidikan menengah kejuruan dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha, ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya. Pendidikan menengah kejuruan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, dapat juga terdiri atas 4 (empat) tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

3. Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan.

Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal. Biasanya disampaikan dalam bentuk universitas, akademi, colleges, seminari, sekolah musik, dan institut teknologi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen.

Berdasarkan kepemilikannya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu: perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Jenis pendidikan tinggi :

1. Pendidikan akademik

Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.

2. Pendidikan profesi

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi.

3. Pendidikan vokasi

Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma

- 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi/gelar ahli madya.

2.1.4 Pendapatan

Dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Pendapatan menurut Lumbatoruan (1990:423) adalah tanggung jumlah uang atau nilai yang selama tahun diperoleh seseorang dari :

- a. Usaha dan tenaga;
- b. Barang tak bergerak;
- c. Harta bergerak;
- d. Hak atas pembayaran berkala, dan;
- e. Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal ini melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier

berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono, 2012: 27)

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Adapun indikator dalam mengukur pendapatan yang diperoleh seorang dikategorikan menjadi (Sudarsono, 2007: 68) :

1. Pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang tiap bulan diharapkan diterima, pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan utama yang bersifat rutin.
2. Pendapatan sampingan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di luar pekerjaan pokok, maka tidak semua orang mempunyai pendapatan sampingan.
3. Pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain, baik bentuk barang maupun bentuk uang, pendapatan bukan dari usaha.

2.1.5 Norma Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata norma berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Sedangkan norma sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sesamanya. (Juwanti 2017 : 18)

Menurut Ajzen (1991), norma sosial adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. norma sosial merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimanas atu orang atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka.

Menurut Iyer (2016), berkaitan dengan perpajakan norma-norma sosial memungkinkan untuk terkonsentrasi secara geografis karena individu yang dekat satu sama lain akan lebih cenderung ingin menjadi bagian dari kelompok dalam kedekatan mereka. Kallgren (2000), mencatat bahwa norma-norma sosial dapat berpengaruh dalam berbagai situasi, dan ini menunjukkan bahwa norma sosial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Adapun indikator untuk mengukur variabel norma sosial (Iyer, 2016), yaitu:

1. Taat membayar pajak karena ingin menjadi contoh bagi lingkungan rumah. Seorang wajib pajak yang taat dalam membayar pajak dapat mempengaruhi prilaku dilingkungan rumah agar dapat menjadi contoh bagi keluarga menjadi wajib pajak yang taat akan membayar pajak.

2. Merasa malu dengan lingkungan sekitar jika tidak membayar pajak.

Saat seorang wajib pajak tidak membayar pajak maka akan timbul rasa Malu dengan lingkungan sekitar yang taat akan pajak.

3. Taat membayar pajak karena dorongan dari ingkungan sekitar.

Maksudnya karena adanya dorongan dari lingkungan sekitar yang taat akan pajak diharapkan dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak sehingga membuat seorang wajib pajak taat membayar pajak.

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggungan, (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan (Yusdinar, 2015 : 55).

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. (Jatmiko, 2006 : 19)

Menurut Tjahjono sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. (dalam Sapriadi, 2013 : 9)

Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. (Pranadata, 2014 : 7)

Menurut Mardiasmo Sanksi perpajakan adalah sebagai berikut: "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.
(Mardiasmo, 2013 : 59)

Adapun indikator sanksi pajak Menurut Mardiasmo terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga, denda, dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

2.1.7 Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Mardiasmo, 2009 : 45)

Menurut Nanang kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini menurut handayanii kepercayaan terhadap

sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (Handayani, 2012)

Adapun indikator kepercayaan dalam mengukur variabel kepercayaan pada pemerintah (Handayani, 2012), yaitu:

1. Kepercayaan pada pemerintah.

Kepercayaan pada pemerintah ialah kepercayaan wajib pajak pada pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

2. Kepercayaan pada sistem hukum.

Kepercayaan pada sistem hukum ialah kepercayaan wajib pajak pada suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan.

3. Kepercayaan pada lembaga peradilan.

Kepercayaan pada lembaga peradilan adalah kepercayaan wajib pajak pada lembaga peradilan yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum.

4. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

Kepercayaan pada pemungutan pajak adalah kepercayaan wajib pajak pada pemerintah bahwa pajak yang di pungut adalah untuk rakyat, segala pajak yang dipungut untuk dialokasikan kembali ke rakyat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2). Penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini beberapa diantaranya adalah :

Tabel 2.1

Hasil Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan 4. Sikap wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang
2	Khoirul Musthofa (2011)	Pengaruh Penghasilan Dan KesadaranWajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tembalang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Tidak ada pengaruh antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang. 2. Tidak ada pengaruh antara penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang. 3. Ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Lanjutan Tabel 2.1

3	Syamsu Alam (2014)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. 3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
4	Reza Darmawan (2015)	Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. tingkat pendidikan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. 2. tingkat penghasilan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Imam Oktafiyant (2015)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lanjutan Tabel 2.1

6	Vanli Tuwo (2016)	Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon 2. kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon 3. Sikap Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara.
7	Febriani Ramadani Juwanti (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Hipotesis kedua (H2) ditolak dan disimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PBB. 3. Hipotesis ketiga (H3) ditolak dan disimpulkan norma sosial pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PBB 4. Hipotesis keempat (H4) ditolak dan disimpulkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 5. Hipotesis kelima (H5) ditolak dan disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Lanjutan Tabel 2.1

8	Arif Rahman(2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diwilayah kota Bukittinggi. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 2. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diwilayah kota Bukittinggi. Artinya Semakin tinggi tingkat pendidikan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 3. Pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Bukittinggi. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
9	Yusron Khoirul Muslim (2018)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabelkontrol	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Variabel pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib PajakBumi dan Bangunan. 2. Variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib PajakBumi dan Bangunan. 3. Variabel kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib PajakBumi dan Bangunan. 4. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib PajakBumi dan Bangunan. 5. Variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib PajakBumi dan Bangunan.

Lanjutan Tabel 2.1

10	Sujatmiko Dwi Setiono(20 18)	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Variabel Pemahaman Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Variabel Sanksi Pajak (X2) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin tegas sanksi yang ada maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Variabel Tingkat Kepercayaan (X3) tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan yang ada maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. 4. Variabel Nasionalisme (X4) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin tinggi rasa Nasionalisme kita maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. 5. Variabel Tarif Pajak (X5) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin jelas Tarif Pajak yang sesuai semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.
----	---------------------------------------	---	---

Sumber : Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2020

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang berupa persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan sistem dan ketentuan perpajakan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan. Perpajakan Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga Kesadaran wajib pajak dan kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musthofa (2011), Utomo (2011) dan Rahman (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. sehingga dirumuskan hipotesis:
 $H_1 = \text{Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.}$

2.3.2 PengaruhTingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Faktor lain menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah pendidikan, Masyarakat yang pendidikannya tinggi tidak akan menemui kesulitan dalam hal pentingnya konsep dasar perpajakan, dan untuk masyarakat yang berpendidikan rendah inilah seharusnya petugas pajak harus lebih efektif lagi dalam bersosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang arti pentingnya konsep dasar perpajakan di Indonesia, hal ini untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Masyarakat yang pendidikannya tinggi tidak akan menemui kesulitan dalam hal pentingnya konsep dasar perpajakan, dan untuk masyarakat yang berpendidikan rendah inilah seharusnya petugas pajak harus lebih efektif lagi dalam bersosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang arti pentingnya konsep dasar perpajakan di Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dermawan (2011) menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. sehingga dirumuskan hipotesis :

H₂ = Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2.3.3 Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Penghasilan adalah semua yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. Penghasilan yang diperoleh masyarakat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat konsumsi masyarakat disesuaikan dengan tingkat penghasilan. Dengan tingkat penghasilan yang tinggi orang akan patuh melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena secara ekonomi kebutuhan mereka telah terpenuhi. Dalam penelitian ini penghasilan terdiri dari penghasilan pokok dan penghasilan sampingan yang berasal dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah.

Penghasilan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar Negara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakannya untuk membayar pajak. Asumsinya seseorang yang berpenghasilan besar yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seharusnya akan dapat membayar pajak, termasuk didalamnya harus ada kesadaran diri untuk membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musthofa (2011) menyatakan bahwa Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. sehingga dirumuskan hipotesis :

H_3 = Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2.3.4 Pengaruh Norma sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Norma sosial yang berkembang di masyarakat tidak menentukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena masyarakat cenderung berperilaku sesuai dengan kelompok yang ada di sekitarnya.

Norma subyektif merupakan pandangan orang lain terhadap perilaku yang dilakukan oleh individu, apabila orang lain tersebut setuju dengan perilaku individu, maka perilaku ini akan dilanjutkan karena diterima oleh masyarakat dan berkembang menjadi norma sosial (Laksito, 2014). Hal tersebut relevan dengan penelitian ini, apabila norma subjektif wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak berkembang menjadi norma sosial maka akan mempengaruhi masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak.

Individu yang telah terpengaruh oleh norma sosial akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya apabila norma sosial yang berkembang patuh pada pembayaran pajak (Iyer, 2016). Dalam penelitian tersebut norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iyer (2016) menyatakan bahwa Norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. sehingga dirumuskan hipotesis :

H_4 = Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2.3.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiono (2018) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. sehingga dirumuskan hipotesis :

H_5 = Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2.3.6 Pengaruh Kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Kepercayaan (*trust*) didefinisikan sebagai kepercayaan yang timbul karena pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggungjawab pemberi barang dan jasa. Kepercayaan merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk melakukan pertukaran dengan partner yang dipercaya, karena keandalan dan integritasnya. Kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif.

Tingkat Kepercayaan wajib pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Fokus utama tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani dkk, 2012)

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiono (2018) menyatakan bahwa Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap

Variabel Dependen (Y)

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah dugaan sementara yang dikemukakan oleh peneliti terhadap variabel independen yang mempengaruhi dependen dalam perumusan masalah yang masih harus dibuktikan melalui pengumpulan data dan melakukan analisis. berdasarkan kerangka berfikir dan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut :

H_1 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandi Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

H_2 = Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandi Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

H_3 = Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandi Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

H_4 = Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandi Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

H_5 = Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandi Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

H_6 = Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandi Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode penelitian asosiatif kausal (sebab-akibat) dengan pendekatan kuantitatif dan informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Tujuan penelitian asosiatif ini adalah melihat apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh dari sebab akibat atau dari variabel independen dan dependen penelitian. Menurut Sugiyono (2012 : 11) Penelitian asosiatif berguna untuk melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti dan lebih bersifat sebab akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama Sembilan bulan dari Januari hingga september 2020. Adapun rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rincian Jadwal Penelitian

KEGIATAN	TAHUN							
	2020							
	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept
Proposal Penelitian								
Pencarian Data Awal								
Penyusunan Proposal								
Pengajuan Proposal								
Penyerahan Proposal Kepada Pembimbing								
Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Revisi Proposal								
Penyerahan Angket Kuesioner								
Pengumpulan Data								
Bimbingan Skripsi								
Ujian Skripsi								

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2020.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2012: 119).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang menerima SPPT-PBB tahun 2019 di desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 473 wajib pajak yang menerima SPPT-PBB.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 91). Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel datanya adalah orang yang ahli mengenai

makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. (Sugiyono, 2019 : 133)

Populasi seluruh SPPT-PBB di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 473. Untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah sampel

N : Populasi

E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10% = 0,1)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{473}{1 + 473(0,1)^2}$$

$$n = \frac{473}{1 + 4,73}$$

$$n = \frac{473}{5,73} \qquad n = 82,54 = 83 \text{ responden (digenapkan)}$$

Pada penelitian ini pengambilan sampel berjumlah 83 responden yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 di Desa Bukit Pedusunan tahun 2019 dari Populasi wajib pajak yang menerima SPPT-PBB-P2 di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 473 wajib pajak.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan untuk penelitian dari

tempat actual terjadinya peristiwa. Data diperoleh secara langsung dari masyarakat dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari obyek penelitian tersebut.

Data bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung yang terdiri dari masyarakat desa bukit pedusunan.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi penelitian terdahulu, studi kasus, dan dokumen kepustakaan lainnya. Data sekunder dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung penulisan proposal ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan cara mengirimkan kuesioner secara langsung kepada setiap responden. Pada penelitian survey, penggunaan kuesioner merupakan hal yang penting sebagai dasar dalam pengumpulan data, dimana hasil kuesioner tersebut akan membentuk angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2017 : 255)

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut juga variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2012:4). Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

a. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2010 :143)

b. Tingkat Pendidikan (X_2)

Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional disebutkan juga bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Selanjutnya

pendidikan dasar (SD-SMP), pendidikan menengah (SMA dan SMK), pendidikan tinggi (Universitas, Institut, Akademik dan Sekolah Tinggi).(UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional)

c. Pendapatan (X₃)

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjekekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. (Sudarsono, 2007: 68)

d. Norma Sosial (X₄)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata norma berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Sedangkan norma sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sesamanya. (Juwanti, 2017 : 18)

e. Sanksi Pajak (X₅)

Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. (Pranadata, 2014 : 7)

f. Kepercayaan pada pemerintah (X₆)

Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan

terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (Handayani, 2012)

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2012:4 Variabel Dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. yang menjadi variabel dependen didalam penelitian ini adalah Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan (Y). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assestment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Rahayu, 2010 : 137-138)

3.6.2 Definisi Operasional

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi variabel	indikator
Kesadaran Wajib Pajak (X₁)	Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2010 :143).	1. Kesadaran akan fungsi pajak 2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan 3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan 4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang. (Rahayu, 2010 : 143).

Lanjutan Tabel 3.1

Tingkat Pendidikan (X2)	Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Sisdiknas no 20 tahun 2003)	1. Pendidikan dasar 2. Pendidikan menengah 3. Pendidikan tinggi (Sisdiknas no 20 tahun 2003)
Pendapatan (X3)	Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. (Sudarsono, 2007: 68)	1. Pendapatan pokok, 2. Pendapatan Sampingan 3. Pendapatan lain-lain (Sudarsono, 2007: 68)
Norma sosial (X4)	Berkaitan dengan perpajakan norma-norma sosial memungkinkan untuk terkonsentrasi secara geografis karena individu yang dekat satu sama lain akan lebih menjadi bagian dari kelompok dalam kedekatan mereka. (Iyer, 2016)	1. Taat membayar pajak karena ingin menjadi contoh bagi lingkungan rumah. 2. Merasa malu dengan lingkungan sekitar jika tidak membayar pajak. 3. Taat membayar pajak karena dorongan dari lingkungan sekitar. (Iyer, 2016)
Sanksi Pajak (X5)	Sanksi perpajakan adalah sebagai berikut: "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. (Mardiasmo, 2013 : 59)	1. Sanksi Administrasi. 2. Sanksi Pidana. (Mardiasmo, 2013 : 59)

Lanjutan Tabel 3.1

Kepercayaan pada pemerintah (X6)	Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (Handayani, 2012)	1. Kepercayaan pada pemerintah. 2. Kepercayaan pada sistem hukum. 3. Kepercayaan pada lembaga peradilan. 4. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. (Handayani, 2012)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2017 : 193)	1. Kepatuhan Perpajakan Formal 2. Kepatuhan Perpajakan material. (Rahayu, 2017 : 193)

3.7 Instrumen Penelitian

Untuk melakukan tes masing-masing variabel maka akan diukur dengan memakai instrument kusioner dengan skala *Likert* dengan kategori *multiple choice*, karena peneliti ingin mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan skala *likert* variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen, sehingga peneliti dapat mengetahui secara rinci pengaruh dari masing-masing indikator variabel.

Dalam skala *likert*, unsur-unsur yang diteliti masing-masing jawaban diberi skor. Skor paling tinggi diberikan pada jawaban yang paling menunjang,

dan skor terendah diberikan pada jawaban paling tidak menunjang. Penentuan skor dari jawaban responden adalah sebagai berikut :

- 1) Jawaban responden (Sangat Baik) diberi nilai 5
- 2) Jawaban responden (Baik) diberi nilai 4
- 3) Jawaban responden (Cukup Baik) diberi nilai 3
- 4) Jawaban responden (Tidak Baik) diberi nilai 2
- 5) Jawaban responden (Sangat Tidak Baik) diberi nilai 1

Sementara kriteria penilaian terhadap rata-rata indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan dengan skala likert yang digunakan (Sudjana, 2000:79) :

1,00-1,80	=	Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator atau yang bersangkutan.
>1,80-2,60	=	Responden memiliki penilaian yang kurang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
>2,60-3,40	=	Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
>3,40-4,20	=	Responden memiliki penilaian yang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
>4,20-5,00	=	Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

3.8 Analisa Data

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19). Varian dan standar deviasi menunjukkan

penyimpangan data terhadap rata-ratanya (*mean*). Apabila standar deviasinya kecil, berarti nilai sampel atau populasinya mengelompokkan di sekitarnya rata-rata hitungnya.

3.8.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013: 53) uji validitas sebagai alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan kolerasi *brivariate* antara masing-masing skor konstruk. Jika korelasi antara masing-masing skor indikator terhadap total skor konstruk memiliki nilai signifikan maka dapat dikatakan bahwa setiap pertanyaan tersebut adalah valid. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ dengan alpha 0,05 dalam hal ini adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah dianggap valid. uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Keandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur apabila dilihat dari stabilitas atau konsistensi internal dari jawaban atau pertanyaan jika pengamatan dilakukan secara berulang.

Kuesioner dikatakan andal (*reliable*) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji coba terhadap butir tersebut dengan bantuan SPSS. Cara ini digunakan untuk menguji reliabilitas

kuesioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai (α) > 0,60 (Ghozali, 2013: 47-48).

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji asumsi ini digunakan untuk menguji apakah variabel dependen, variabel independen atau keduanya dari sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya memiliki distribusi data yang normal. Data distribusi normal dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi normalitas. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, keenam variabel mempunyai distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Penghitungan dengan menggunakan uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung

masalah multi kolinearitas diantara variabel independennya. Model regresi dikatakan bebas multikolinearitas bila :

- a) Mempunyai nilai tolerance diatas 10%
- b) Mempunyai nilai VIF kurang dari angka 10

Bila hal diatas terjadi maka model regresi bebas dari masalah multikolinearitas. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, keenam variabel bebas dari masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut *homoskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas*, tidak *heteroskedastisitas*.

Menurut Ghozali (2013:139-143) *heteroskedastisitas* ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang). Maka terjadi *heteroskedastisitas*. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Selain itu, *heteroskedastisitas* dapat diketahui melalui uji *Glesjer*. Jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013: 110) autokorelasi dikenal dengan nilai *Durbin Watson* (D-W) artinya terjadi pada periode 1 dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dengan

periode t dengan kesalahan pada periode t_1 sebelumnya (Purwandaka, 2012). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan uji *Durbin Watson* (DW) sebagai berikut :

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW lebih besar dari pada $(4-dl)$ maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negative.
- 4) Bila nilai DW terletak diantara batas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Metode regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Model analisis ini digunakan karena dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan
a	= Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4, b_5	= Koefisien Regresi
X_1	= Kesadaran Wajib Pajak
X_2	= Tingkat Pendidikan
X_3	= Pendapatan
X_4	= Norma Sosial
X_5	= Sanksi Pajak
X_6	= kepercayaan pada pemerintah
e	= <i>error</i> , yaitu kesalahan regresi

Data tersebut selanjutnya diproses dengan bantuan software *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 23.

3.8.5 Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

1. Uji-t (Parsial)

Uji-t ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabelindependen $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ terhadap variabel dependen (Y) denganasumsi variabel lainnya adalah konsta (Kuncoro, 2003:97). Langkah-langkah dalam pengujian diawali dengan membuat formulasi hipotesis sebagaiberikut.

1) Menentukan hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

H_0 : $b_i=0$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen(X_i) terhadap variabel depeden (Y)

HI: $b_i < 0$, artinya ada pengaruh antara variabel independen (X_i) terhadap variabel dependen (Y).

- 2) Menentukan tingkat signifikan dengan tabel
- 3) Mencari t hitung dengan Rumus :

$$T_{hitung} = \frac{b_i}{s_{b_i}}$$

Keterangan :

b_i = Koefisien regresi variabel independen ke i .

S_{b_i} = Standar deviasi

Keputusan :

H_0 : diterima bila t hitung $< t$ tabel, H_1 ditolak

H_1 : diterima bila t hitung $> t$ tabel, H_0 ditolak.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R^2) = 1, artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel- variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R^2) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi- variasi dependen (Kuncoro, 2001: 100).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kecamatan, kemudian menjadi kabupaten setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 15kecamatan(BPS, 2019). yaitu sebagai berikut:

1. Kuantan Mudik
2. Hulu Kuantan
3. Gungung Toar
4. Pucuk Rantau
5. Singingi
6. Singingi Hilir
7. Kuantan Tengah
8. Sentajo Raya
9. Benai
10. Kuantan Hilir
11. Pangean
12. Logas Tanah Darat
13. Kuantan Hilir Seberang
14. Cerenti
15. Inuman

Kuantan Singingi beribukota di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah yang dipimpin satu orang bupati dan dibantu oleh wakilnya, adapun pejabat bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu :

1. Drs. H. Rusdji S Abrus Periode Tahun 2000 – 2001
2. Drs. H. Asrul Ja'afar Periode 2001-2005
3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006 -2011
4. H. Sukarmis Periode Tahun 2011-2015
5. Drs. H. Mursini, M.Si Periode Tahun 2016 s/d sekarang

4.1.1 Letak dan Luas Wilayah

Letak Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 0°00'LU sampai 01°00' LS dan 101°02' sampai 101°55' BT, dengan luas wilayah 7656,03 km² dengan jarak dari permukaan laut 120 km dengan ketinggian berkisar 25-30 m dari permukaan laut. Kabupaten ini berbatasan dengan :

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah selatan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah barat dengan Provinsi Sumatra Barat
4. Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

4.1.2 Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten ini pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,6°C sampai 36,5°C dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C sampai 22,0°C. rata-rata curah hujan di Kabupaten ini berkisar antara 229,5 sampai 1.093 mm/th dengan keadaan musim berkisar, musim hujan jatuh pada

bulan september sampai dengan februari dan musim kemarau pada bulan maret sampai agustus.

4.1.3 Jumlah penduduk

Berdasarkan data agregat pendudukan perkecamatan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sampai keadaan akhir tahun 2017 berjumlah 357.381 jiwa yang terdiri dari 183.998 laki-laki dan 173.383 jiwa perempuan. Agar lebih jelas data dipaparkan pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kuantan Mudik	13.733	13.227	26.960
2	Kuantan Tengah	27.970	26.857	54.827
3	Singingi	17.154	15.568	32.722
4	Kuantan Hilir	7.286	7.205	14.491
5	Cerenti	10.080	9.533	19.613
6	Benai	10.722	9.860	20.582
7	Gunung Toar	7.727	7.303	15.030
8	Singingi Hilir	23.301	20.114	43.415
9	Pangean	10.450	10.259	20.709
10	Logas Tanah Darat	11.517	10.680	22.197
11	Inuman	10.057	9.610	19.667
12	Huku Kuantan	4.716	4.536	9.252
13	Kuantan Hilir Seberang	6.373	6.398	12.771
14	Sentajo Raya	15.457	14.711	30.168
15	Pucuk Rantau	7.455	6.722	14.177
Jumlah		183.998	173.383	357.381

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (2020)

4.1.4 Hidrografi

DiKabupaten Kuantan Singingi terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah ini yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Fungsi dari sungai ini sangat berarti bagi masyarakat untuk transportasi, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Adapun daerah aliran sungai tersebut mengalir 9 kecamatan yang terdiri dari kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

4.1.5 Sejarah Desa Bukit Pedusunan

Desa Bukit Pedusunan adalah sebuah Desa hasil dari pemekaran dari Desa induk yaitu Desa Luai, dahulunya Desa Bukit Pedusunan adalah sebuah dusun yang bernama dusun bukit. Pada tahun 1970 dusun bukit diusulkan menjadi sebuah Desa pemekaran dan pada tahun tersebut dusun bukit dimekarkan dan berpisah dari Desa induk yaitu Luai. Pada tahun 1970 dusun bukit menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Bukit Pedusunan. Desa Bukit Pedusunan dibagi menjadi 2 dusun yakni dusun I kobunnopi dan dusun II danau.

Disetiap dusun tersebut terdiri dari wilayah pertanian, perkebunan dan perumahan. dusun 1 pada umumnya lebih luas area perkebunan, perumahan juga terdapat sebuah danau yang cukup luas, dusun 1 merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian karena kantor desa, kantor bpd, kantor ued-sp, sekolah, dll berada di dusun ini dan saat ini juga menjadi area wisata. Sementara dusun 2 adalah area lahan pertanian dan perumahan, setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

4.1.6 Demografi

Desa Bukit Pedusunan merupakan salah satu desa dari 24 desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik dengan jumlah penduduk 1414 jiwa dengan 333 KK. Desa ini terletak di dataran tinggi yang berjarak $\pm$ 3 km kearah timur dari kota kecamatan, desa ini mempunyai luas 18 KM² dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Gunung Toar. Sebagaimana desa-desa lain di wilayah indonesia mempunyai iklim tropis ,musim kemarau ataupun musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat maupun terhadap kesuburan tanah.

4.1.7 Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data saat ini,Desa Bukit Pedusunan mempunyai jumlah penduduk 1414 Jiwa dengan 333 KK,yang tersebar di 2 dusun dengan rincian seperti tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa

No	Uraian	Dusun I	Dusun II	Jumlah
1	Jiwa	601	813	1414
2	KK	191	142	333

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Bukit Pedusunan beragam, mulai dari tidak tamat SD yang umumnya pada masyarakat generasi tua,sarjana baik diploma I,II,III atau strata I bahkan ada beberapa yang strata II, pada saat ini juga masih banyak yang masih menimba ilmu baik tingkat dasar maupun diperguruan tinggi,secara umum dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	Sarjana
85	305	303	47

c. Mata Pencarian

Karena desa bukit Pedusunan merupakan Desa pola perkebunan, maka dengan sendirinya sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, pekebun hal ini selengkapnya dapat dilihat pada table 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Mata Pencarian

Petani	Pedagang	PNS	Buruh	DII
357	44	43	57	368

d. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Bukit Pedusunan sebagian besar diperuntukan untuk lahan perkebunan dan pertanian, sedangkan sisanya untuk lahan pekarangan yang merupakan bangunan perumahan dan fasilitas lainnya.

e. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan ternak oleh penduduk desa bukit pedusunan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Pemilikan Ternak

Ayam	Kambing	Sapi	Kerbau	DII
289	14	35	68	-

f. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum yang ada didesa bukit pedusunan secara garis besar pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Prasarana Desa

Balai Desa	Jalan kab	Jalan kec	Jalan Desa	Masjid
1	1	-	5	1

4.1.8 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bukit Pedusunan yang pada saat ini cukup merata dengan berbagai profesi, mulai dari pedagang, petani, pekebun, dan PNS. Kesenjangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin secara umum tidak terlalu jauh, karena masyarakat Bukit Pedusunan masih mempunyai rasa kekeluargaan yang tinggi karena memang kebanyakan masih ada hubungan persukuan antara satu sama lain sehingga masih besarnya rasa tolong menolong antar sesama

4.1.9 Pemerintahan Desa Bukit Pedusunan

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik menganut system kelembagaan pemerintah Desa dengan pola minimal yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan, dan 2 kepala dusun. Sementara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 5 orang yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan unsur seksi/anggota yaitu seksi pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

a. Kepala Desa

Kepala Desa Bukit Pedusunan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa dari beberapa calon yang mengajukan diri dan memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun

kepala Desa yang telah memimpin sejak lahirnya Desa Bukit Pedusunan diantaranya sebagai berikut:

1. Rusdi Periode 1970-1990 (4 Periode)
2. Rahmat Periode 1990-2000 (2 Periode)
3. Rusli Periode 2000-2002
4. Martunus Periode 2002-2007
5. Drs. Masril Periode 2007-2019 (2 Periode)
6. Basuryata 2019-Sekarang

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa di Desa Bukit Pedusunan yaitu Yeki Sandra Irawan. Sekretaris Desa dalam pemerintahan desa sering disebut perangkat desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam urusan administrasi, keuangan, serta pembangunan desa.

c. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala Urusan di Desa Bukit Pedusunan terdiri dari 2 yaitu, Kaur Umum yang dipimpin Rodel Kasri, Kaur Keuangan dipimpin Lesta Nofita. Kaur ini mempunyai tugasnya masing dalam membantu sekretaris, seperti membantu sekretaris dalam bidang umum lainnya dan pengelolaan keuangan desa.

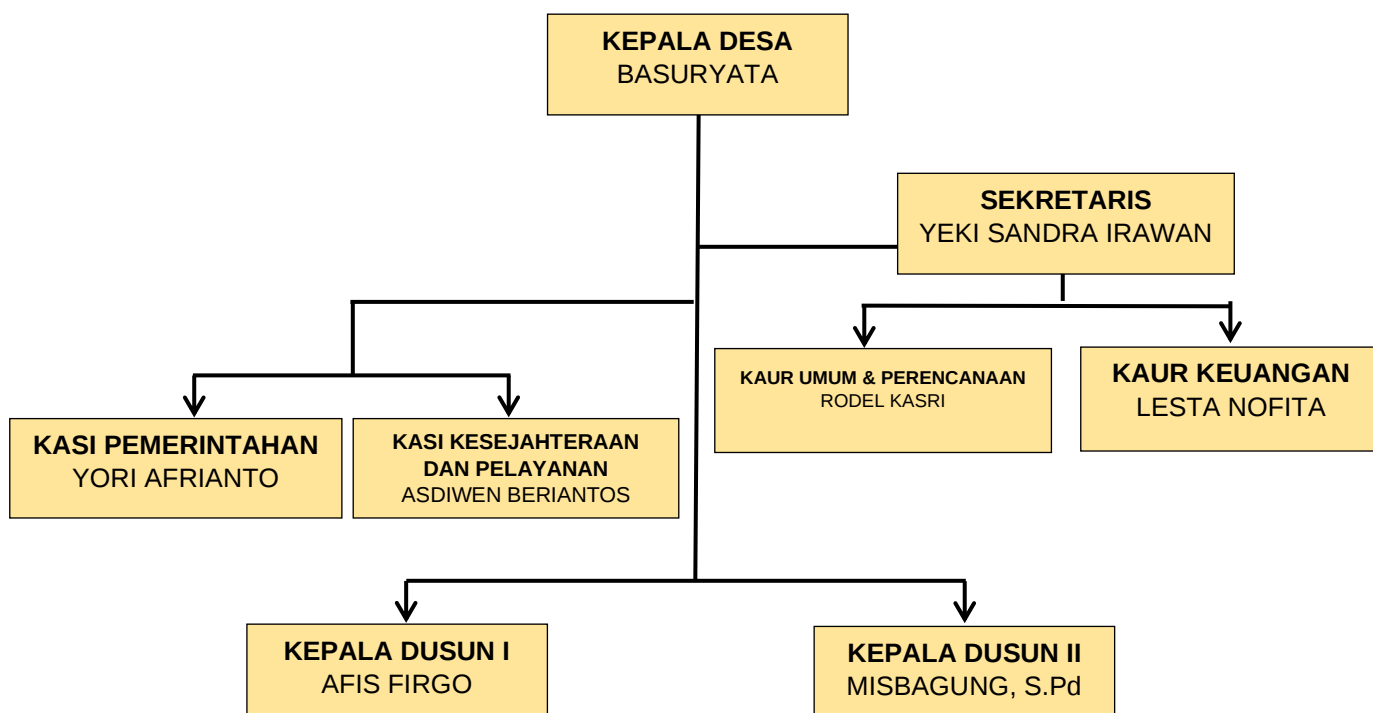
d. Kepala Seksi (Kasi)

Kepala Seksi di Desa Bukit Pedusunan terdiri dari 2 yaitu, Kasi Pemerintahan yang dipimpin Yori Afrianto, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dipimpin Asdiwen Beriantos. Kasi ini mempunyai tugasnya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, seperti membantu masalah pembangunan desa, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

e. Kepala Dusun (Kadus)

Kepala dusun merupakan pemimpin dari setiap dusun-dusun yang ada di sebuah desa, jumlah kadus setiap desa berbeda tergantung dengan jumlah dusun yang ada di setiap desa tersebut. Di Desa Bukit Pedusunan terdapat 2 dusun yaitu dusun I Kebun Nopi yang dipimpin Afis Firgo dan Dusun II Danau yang dipimpin oleh Misbagung, S.Pd. Berikut ini merupakan Struktur organisasi Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Bukit Pedusunan



Sumber: Kantor Desa Bukit Pedusunan, 2020.

4.1.10 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling* yang ditentukan sebelumnya hingga diperoleh sejumlah data yang diolah. Kuesioner disebar sejumlah 83 eksemplar sesuai dengan jumlah sampel penelitiannya. Tingkat pengembalian kuesioner dari responden sejumlah 83 eksemplar (100%), kuesioner yang dapat diolah sebanyak 83 buah. Berikut ini tabel kuesioner yang dapat diolah:

Tabel 4.7
Deskriptif Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	83	100%
2	Kuesioner yang kembali	83	100%
3	Kuesioner yang dapat diolah	83	100%
4	Kuesioner yang tidak dapat diolah	-	-
Jumlah		83	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

4.1.11 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh SPPT-PBB di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik yang berjumlah 83 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pekerjaan.

a. Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden terbagi dalam 2 kelompok dari 83 responden, yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapati karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat seperti di bawah ini:

Tabel 4.8

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin Responden	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	37 Orang	44,58%
2	Perempuan	46 Orang	55,42%
Jumlah		83 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang berjenis kelamin perempuan sebesar 55,42%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 44,58%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur responden terbagi dalam 3 kelompok dari 83 responden, yaitu <35 tahun, 36-50 tahun dan >50 tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan umur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Karakteristik Responden berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	< 35 Tahun	20	24,10%
2	36-50 Tahun	38	45,78%
3	>50 Tahun	25	30,12%
Jumlah		83 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang berumur 36-50 Tahun sebesar 45,78%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang berumur <35 Tahun sebesar 24,10%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan responden terbagi dalam 5 kelompok dari 83 responden, yaitu Tingkat PNS, Karyawan Swasta, Wirausaha, Petani dan Lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	PNS	7	8,43%
2	Karyawan Swasta	15	18,07%
3	Wirausaha	18	21,69%
4	Petani	33	39,76%
5	Lainnya	11	12,05%
Jumlah		83 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang pekerjaan sebagai petani sebesar 39,76%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang bekerja pegawaisebesar 12,05%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan responden terbagi dalam 5 kelompok dari 83 responden, yaitu Tingkat SD, SMP, SMA S1 dan S2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	SD	12	14,46%

2	SMP	33	39,76%
3	SMA	29	34,94%
4	S1	8	9,64%
5	S2	1	1,21%
Jumlah		83 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang Tingkat Pendidikan SMP sebesar 39,76%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang Tingkat Pendidikan S2 sebesar 1,21%.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan responden terbagi dalam 3 kelompok dari 83 responden, yaitu Tingkat Pendapatan >1.000.000, 1.000.000, sd 2.000.000, dan >2.000.000. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendapatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Karakteristik Responden berdasarkan pendapatan

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	<Rp1.000.000,.	12	14,46%
2	Rp1.000.000, sd Rp2.000.000	43	51,81%
3	> Rp2.000.000,.	28	33,73%
Jumlah		83 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.12, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang paling banyak yang memiliki pendapatan 1.000.000, sd 2.000.000, sebanyak 43 responden setara

51,81%, sedangkan yang menjadi yang paling sedikit adalah responden yang berpendapatan >1.000.000 sebanyak 12 responden setara 14,46%.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013: 19). Analisis data penelitian ini dilakukan pada 44 item pernyataan dalam kuesioner yang dinilai oleh responden.

4.2.1.1 Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) terdiri dari 8 item pernyataanitem pertama yaituMembayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalammenunjang pembangunan negara($X_{1.1}$), item kedua yaitu Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat ($X_{1.2}$), item ketiga yaitu Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakatkepada negara ($X_{1.3}$), item keempat yaitu Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara ($X_{1.4}$), item kelima yaitu Pajak bumi dan bangunan digunakan sebagai pendapatan daerah ($X_{1.5}$), item keenam yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah ($X_{1.6}$), item ketujuh yaitu Adanya Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku ($X_{1.7}$), item kedelapan yaitu Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan ($X_{1.8}$).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{1.1}	-	4,82%	34,94%	46,99%	13,25%	100%	3,69	Baik
X _{1.2}	-	9,64%	27,71%	45,78%	16,87%	100%	3,70	Baik
X _{1.3}	-	7,23%	26,51%	48,19%	18,07%	100%	3,77	Baik
X _{1.4}	-	12,05%	32,53%	39,76%	15,66%	100%	3,59	Baik
X _{1.5}	-	-	25,3%	45,78%	28,92%	100%	4,04	Baik
X _{1.6}	-	10,84%	45,78%	34,94%	8,43%	100%	3,41	Baik
X _{1.7}	-	12,05%	43,37%	33,73%	10,84%	100%	3,43	Baik
X _{1.8}	4,82%	31,33%	36,14%	16,87%	10,84%	100%	2,98	Cukup Baik
Rata-Rata	3,66							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.13 diatas untuk item Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara (X_{1.1}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 45,99% dengan rata-rata item sebesar 3,69 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat (X_{1.2}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 45,78% dengan rata-rata item 3,70 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara (X_{1.3}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 48,19% dengan rata-rata item 3,77 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara (X_{1.4}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 39,76% dengan rata-rata item 3,59 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pajak bumi dan bangunan digunakan sebagai pendapatan daerah (X_{1.5}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 45,78% dengan rata-

rata item 4,04 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah ($X_{1.6}$) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 45,78% dengan rata-rata item 3,41 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Adanya Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku ($X_{1.7}$) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 43,37% dengan rata-rata item 3,43 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan ($X_{1.8}$) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 36,14% dengan rata-rata item 2,98 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak (X) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{1.3}$) sebesar 3,77 kriteria penilaian baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{1.8}$) yang hanya sebesar 2,98 cukup baik. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,66. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak pada desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik berada dalam kategori baik.

4.2.1.2 Variabel Tingkat Pendidikan (X_2)

Variabel tingkat pendidikan (X_2) terdiri dari 6 item pernyataan, item pertama yaitu Saya taat membayar pajak meskipun tidak menyelesaikan sekolah dasar ($X_{2.1}$), item kedua Saya taat membayar pajak meskipun hanya

tamatan sekolah dasar (X_{2.2}), item ketiga yaitu Saya taat membayar pajak meskipun hanya tamatan sekolah menengah pertama (X_{2.3}), item keempat yaitu Saya taat membayar pajak karena saya berpendidikan sekolah menengah atas (X_{2.4}), item kelima yaitu Saya taat membayar pajak karena saya berpendidikan diploma (X_{2.5}), item keenam yaitu Saya taat membayar pajak karena saya berpendidikan sarjana (X_{2.6}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Desa (X₂)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata - Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{2.1}	-	14,46%	50,6%	26,51%	8,43%	100%	3,29	Cukup Baik
X _{2.2}	-	10,84%	42,17%	32,53%	14,46%	100%	3,51	Baik
X _{2.3}	-	7,23%	43,37%	32,53%	16,87%	100%	3,59	Baik
X _{2.4}	-	18,07%	31,33%	37,35%	13,25%	100%	3,46	Baik
X _{2.5}	-	3,61%	38,55%	40,96%	16,87%	100%	3,71	Baik
X _{2.6}	-	9,64%	31,33%	45,78%	13,25%	100%	3,63	Baik
Rata-Rata	3,38							Cukup Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.14 di atas untuk item Saya taat membayar pajak meskipun tidak menyelesaikan sekolah dasar(X_{2.1}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 50,6% dengan rata-rata item 3,29 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Saya taat membayar pajak meskipun hanya tamatan sekolah dasar(X_{2.2}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 42,17% dengan rata-rata item 3,51 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya taat membayar pajak meskipun hanya tamatan sekolah menengah pertama(X_{2.3}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju

yaitu 43,37% dengan rata-rata item 3,59 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk, item Saya taat membayar pajak karena saya berpendidikan sekolah menengah atas($X_{2.4}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 37,53% dengan rata-rata item 3,46 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item ($X_{2.5}$) Saya taat membayar pajak karena saya berpendidikan diplomasebagian besar responden menjawab setuju yaitu 40,96% dengan rata-rata item 3,71 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk ($X_{2.6}$) Saya taat membayar pajak karena saya berpendidikan sarjanasebagian besar responden menjawab setuju yaitu 45,78% dengan rata-rata item 3,63 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Tingkat Pendidikan (X_2) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{2.1}$) sebesar 3,29 kriteria penilaian cukup baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{2.4}$) yang hanya sebesar 3,59. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,38. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa tingkat pendidikan di desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik berada dalam kategori cukup baik.

4.2.1.3 Variabel Pendapatan (X_3)

Variabel Pendapatan (X_3) terdiri dari 6 item pernyataan, item pertama yaitu \Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan pokok rendah($X_{3.1}$), item kedua yaitu Pendapatan saya saat ini dapat memenuhi kewajiban seperti membayar pajak bumi bangunan ($X_{3.2}$), item ketiga yaitu Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan tambahan saya kecil($X_{3.3}$), item keempat yaitu Saya selalu taat membayar pajak meskipun tidak memiliki

pekerjaan sampingan untuk memperoleh pendapatan tambahan (X_{3.4}), item kelima yaitu Besar kecilnya pendapatan saya tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak (X_{3.5}), item keenam yaitu Meski saya tidak memiliki pendapatan lain selain gaji pokok namun saya tetap taat membayar pajak bumi dan bangunan (X_{3.6}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pendapatan (X₃)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata - Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{3.1}	2,41%	7,23%	44,58%	39,94%	10,84%	100%	3,45	Baik
X _{3.2}	6,02%	8,43%	31,33%	40,96%	13,25%	100%	3,47	Baik
X _{3.3}	2,41%	19,28%	26,51%	27,71%	24,1%	100%	3,52	Baik
X _{3.4}	3,61%	18,07%	38,55%	24,1%	15,66%	100%	3,30	Cukup Baik
X _{3.5}	6,02%	10,84%	19,28%	38,55%	25,3%	100%	3,66	Baik
X _{3.6}	3,61%	6,02%	15,66%	50,6%	24,1%	100%	3,85	Baik
Rata-Rata	3,54							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.15 diatas untuk item Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan pokok rendah (X_{3.1}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 44,58% dengan rata-rata item sebesar 3,45 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategoribaik. Untuk item Pendapatan saya saat ini dapat memenuhi kewajiban seperti membayar pajak bumi bangunan (X_{3.2}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 40,96% dengan rata-rata item sebesar 3,47 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item (X_{3.3}) Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan tambahan saya kecil sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 27,71% dengan rata-rata item sebesar 3,52rata-rata

responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Saya selalu taat membayar pajak meskipun tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk memperoleh pendapatan tambahan ($X_{3.4}$) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 38,55% dengan rata-rata item sebesar 3,30 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Besar kecilnya pendapatan saya tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak($X_{3.5}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 38,55% dengan rata-rata item sebesar 3,66 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk itemMeski saya tidak memiliki pendapatan lain selain gaji pokok namun saya tetap taat membayar pajak bumi dan bangunan($X_{3.6}$) sebagian besar responden menjawab setuju 50,6% dengan rata-rata item sebesar 3,85 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Pendapatan (X_3) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{3.6}$) sebesar 3,85 kriteria penilaian baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{3.3}$) yang hanya sebesar 3,52. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,54 Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa pendapatan pada desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik berada dalam kategoribaik.

4.2.1.4 Variabel Norma Sosial (X_4)

Variabel Norma Sosial terdiri dari 6 item pernyataan, item pertama Saya taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena ingin menjadi contoh yang baik kepada anak-anak saya ($X_{4.1}$), item kedua yaitu Saya ingin membantu pemerintah untuk ikut serta mensosialisasikan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada lingkungan rumah saya ($X_{4.2}$), item ketiga

yaitu Saya merasa malu dengan lingkungan rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (X_{4.3}), item keempat yaitu Saya merasa malu dengan tetangga sekitaran rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (X_{4.4}), item kelima yaitu Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tetangga dan kerabat saya melakukan hal sama (taat membayar pajak) (X_{4.5}), item keenam yaitu Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tidak mau dikenai denda (X_{4.6}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Terhadap Norma Sosial (X₄)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{4.1}	-	6,02%	27,71%	42,17%	24,1%	100%	3,84	Baik
X _{4.2}	3,61%	12,05%	46,99%	24,1%	13,25%	100%	3,31	Cukup Baik
X _{4.3}	2,41%	9,64%	22,89%	45,78%	19,28%	100%	3,70	Baik
X _{4.4}	4,82%	20,48%	34,94%	22,89%	16,87%	100%	3,26	Cukup Baik
X _{4.5}	7,23%	22,89%	31,33%	24,1%	14,46%	100%	3,16	Cukup Baik
X _{4.6}	-	20,48%	20,48%	31,33%	27,71%	100%	3,66	Baik
Rata-rata	3,49							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.16 di atas untuk item pernyataan Saya taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena ingin menjadi contoh yang baik kepada anak-anak saya (X_{4.1}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 42,17% dengan rata-rata item sebesar 3,84 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya ingin membantu pemerintah untuk ikut serta mensosialisasikan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada lingkungan rumah saya (X_{4.2}), sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 46,99% dengan rata-rata item sebesar

3,31 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Saya merasa malu dengan lingkungan rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (X_{4.3}) sebagian besar responden menjawab netral yaitu 45,78% dengan rata-rata item sebesar 53,70 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya merasa malu dengan tetangga sekitaran rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(X_{4.4}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 34,94% dengan rata-rata item sebesar 3,26 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tetangga dan kerabat saya melakukan hal sama (taat membayar pajak)(X_{4.5}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 31,33% dengan rata-rata item sebesar 3,16 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tidak mau dikenai denda(X_{4.6}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 31,37% dengan rata-rata item sebesar 3,66 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Norma Sosial (X₄) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (X_{4.2}) sebesar 3,31 kriteria penilaian Cukup Baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (X_{4.5}) sebesar 3,16. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,49. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa Norma Sosial pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik dalam kategori Baik.

4.2.1.5 Variabel Sanksi Pajak (X_5)

Variabel Sanksi Pajak terdiri dari 6 item pernyataan, item pertama yaitu Sanksi pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak agar tercipta kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara ($X_{5.1}$), item kedua yaitu Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi administrasi jika tidak membayar atau telat membayar pajak PBB ($X_{5.2}$), item ketiga yaitu Denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran adalah wajar ($X_{5.3}$), item keempat yaitu Denda sebesar 2% tidak memberatkan wajib pajak ($X_{5.4}$), pengenaan sanksi pajak PBB harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran ($X_{5.5}$), item kelima yaitu Apabila melakukan pelanggaran yang merugikan Negara secara material maka dikenai sanksi denda/pidana ($X_{5.6}$).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak (X_5)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
$X_{5.1}$	-	7,23%	27,71%	50,6%	14,46%	100%	3,72	Baik
$X_{5.2}$	-	36,14%	39,94%	18,07%	10,84%	100%	3,04	Cukup Baik
$X_{5.3}$	-	21,69%	56,63%	13,25%	8,43%	100%	3,08	Cukup Baik
$X_{5.4}$	-	6,02%	31,33%	44,58%	18,07%	100%	3,75	Baik
$X_{5.5}$	-	-	30,12%	53,01%	16,87%	100%	3,87	Baik
$X_{5.6}$	-	7,23%	40,96%	31,33%	20,48%	100%	3,65	Baik
Rata-rata	4,31							Sangat Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020..

Berdasarkan tabel 4.17 di atas untuk item pernyataan Sanksi pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak agar tercipta kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara ($X_{5.1}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 50,6% dengan rata-rata item sebesar 3,72 rata-

rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi administrasi jika tidak membayar atau telat membayar pajak PBB (X_{5.2}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 39,94% dengan rata-rata item sebesar 3,04 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran adalah wajar (X_{5.3}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 5,63% dengan rata-rata item sebesar 3,08 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Denda sebesar 2% tidak memberatkan wajib pajak (X_{5.4}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 44,58% dengan rata-rata item sebesar 3,75 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pengenaan sanksi pajak PBB harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran (X_{5.5}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 53,01% dengan rata-rata item sebesar 3,87 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Apabila melakukan pelanggaran yang merugikan Negara secara material maka dikenai sanksi denda/pidana (X_{5.6}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 40,96% dengan rata-rata item sebesar 3,65 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Sanksi Pajak (X₅) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (X_{5.3}) sebesar 3,08 dengan penilaian cukup baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (X_{5.2}) sebesar 3,04 dengan penilaian cukup baik. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,31. Artinya rata-rata

responden dalam penelitian ini bahwa Sanksi Pajak pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik dalam kategori Sangat Baik.

4.2.1.6 Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X_6)

Variabel Kepercayaan pada pemerintah terdiri dari 8 item pernyataan, item pertama yaitu Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digunakan untuk pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah ($X_{6.1}$), item kedua yaitu Saya percaya bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggung jawab ($X_{6.2}$), item ketiga yaitu Saya percaya undang-undang yang mengatur perpajakan ($X_{6.3}$), item keempat yaitu Saya percaya Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana ($X_{6.4}$), item kelima yaitu Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas telah dijatuhi hukuman secara adil ($X_{6.5}$), item keenam yaitu Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan wajib pajak telah dijatuhi hukuman secara adil ($X_{6.6}$), item ketujuh yaitu Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah ($X_{6.7}$), item kedelapan yaitu Saya percaya ada petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kesejahteraan ($X_{6.8}$). Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18
Tanggapan Responden Terhadap Kepercayaan pada Pemerintah (X_6)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	S T S	TS	KS	S	SS			
$X_{6.1}$	-	12,05%	21,69%	53,01%	13,25%	100%	3,67	Baik
$X_{6.2}$	-	16,87%	22,89%	51,81%	8,43%	100%	3,52	Baik
$X_{6.3}$	-	9,64%	40,96%	42,17%	7,23%	100%	3,47	Baik
$X_{6.4}$	-	4,82%	43,37%	38,55%	13,25%	100%	3,60	Baik
$X_{6.5}$	-	2,41%	16,87%	61,45%	19,28%	100%	3,98	Baik
$X_{6.6}$	-	10,84%	18,07%	56,63%	14,46%	100%	3,75	Baik

X _{6.7}	-	4,82%	38,55%	51,81%	4,82%	100%	3,57	Baik
X _{6.8}		4,82%	37,35%	50,6%	7,23%	100%	3,60	Baik
Rata-rata	3,64							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.18 di atas untuk item pernyataan Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digunakan untuk pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah (X_{6.1}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 53,01% dengan rata-rata item sebesar 3,67 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategoribaik. Untuk item Saya percaya bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggung jawab (X_{6.2}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 51,81% dengan rata-rata item sebesar 3,52 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategoribaik. Untuk item Saya percaya undang-undang yang mengatur perpajakan (X_{6.3}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 42,17% dengan rata-rata item sebesar 3,47 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya percaya Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana (X_{6.4}) sebagian besar responden menjawabkurang setuju yaitu 43,37% dengan rata-rata item sebesar 3,60 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas telah dijatuhi hukuman secara adil (X_{6.5}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 61,45% dengan rata-rata item sebesar 3,98 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan wajib pajak telah dijatuhi hukuman secara adil (X_{6.6}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 61,45% dengan rata-rata item sebesar 3,75 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada baik. Untuk item Saya percaya bahwa Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah ($X_{6.7}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 51,81% dengan rata-rata item sebesar 3,57 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada baik. Untuk item Saya percaya ada petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kesejahteraan ($X_{6.8}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 50,6% dengan rata-rata item sebesar 3,60 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kepercayaan pada pemerintah (X_6) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{6.5}$) sebesar 3,98 kriteria penilaian Baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{6.3}$) sebesar 3,47. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,64. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa Kepercayaan pada pemerintah pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik dalam kategori Baik.

4.2.1.7 Variabel Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)

Variabel Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terdiri dari 6 item pernyataan yang pertama Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu (Y.1), yang kedua yaitu item Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus (Y.2), yang ketiga yaitu item Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar (Y.3), yang keempat yaitu Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu (Y.4), yang kelima yaitu Keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan

dikenakan sanksi (Y.5), yang keenam yaitu Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut (Y.6).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4.119
Tanggapan Responden Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Y)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
Y.1	-	13,25 %	46,99%	30,12%	9,64%	100%	3,36	Cukup Baik
Y.2	-	-	18,07%	44,58%	37,35%	100%	4,19	Baik
Y.3	-	-	18,07%	37,35%	44,58%	100%	4,26	Sangat Baik
Y.4	-	-	31,33%	44,58%	24,1%	100%	3,93	Baik
Y.5	-	-	27,71%	30,12%	42,17%	100%	4,14	Baik
Y.6	3,61%	3,61%	21,69%	24,1%	46,99%	100%	4,07	Baik
Rata-rata	3,99							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2019.

Berdasarkan tabel 4.19 di atas untuk item pernyataan Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu (Y.1) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 46,99% dengan rata-rata item sebesar 43,65 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus (Y.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 44,58% dengan rata-rata item sebesar 4,19 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar (Y.3) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 44,58% dengan rata-rata item sebesar 4,26 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu (Y.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 44,58% dengan rata-rata item

sebesar 3,99 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan dikenakan sanksi (Y.5) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 42,17% dengan rata-rata item sebesar 4,14 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Debitur membayar pokok pinjaman tepat pada waktunya (Y.6) sebagian besar responden menjawab Sangat Setuju yaitu 46,99% dengan rata-rata item sebesar 4,07 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (Y.1) dan (Y.6) sebesar 3,65 dan 4,07, kriteria penilaian Baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (Y.5) sebesar 4,14. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,99. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik dalam kategori Baik.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item-total correlation*. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka dinyatakan valid.
- 2) Bila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka dinyatakan tidak valid.

Adapun hasil pengujian validitas instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel 4.20 dibawah ini:

Tabel 4.20
Uji Validitas

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak(X_1)	X _{1.1}	0,305	0,222	VALID
		X _{1.2}	0,490	0,222	VALID
		X _{1.3}	0,501	0,222	VALID
		X _{1.4}	0,394	0,222	VALID
		X _{1.5}	0,513	0,222	VALID
		X _{1.6}	0,342	0,222	VALID
		X _{1.7}	0,338	0,222	VALID
		X _{1.8}	0,320	0,222	VALID
2.	Tingkat Pendidikan(X_2)	X _{2.1}	0,314	0,222	VALID
		X _{2.2}	0,470	0,222	VALID
		X _{2.3}	0,552	0,222	VALID
		X _{2.4}	0,557	0,222	VALID
		X _{2.5}	0,429	0,222	VALID
		X _{2.6}	0,419	0,222	VALID
3	Pendapatan(X_3)	X _{3.1}	0,466	0,222	VALID
		X _{3.2}	0,406	0,222	VALID
		X _{3.3}	0,567	0,222	VALID
		X _{3.4}	0,271	0,222	VALID
		X _{3.5}	0,617	0,222	VALID
		X _{3.6}	0,383	0,222	VALID
4	Norma Sosial (X_4)	X _{4.1}	0,371	0,222	VALID
		X _{4.2}	0,362	0,222	VALID
		X _{4.3}	0,536	0,222	VALID
		X _{4.4}	0,585	0,222	VALID
		X _{4.5}	0,534	0,222	VALID
		X _{4.6}	0,264	0,222	VALID
5	Sanksi Pajak (X_5)	X _{5.1}	0,495	0,222	VALID
		X _{5.2}	0,629	0,222	VALID
		X _{5.3}	0,522	0,222	VALID
		X _{5.4}	0,565	0,222	VALID
		X _{5.5}	0,358	0,222	VALID
		X _{5.6}	0,523	0,222	VALID
6	Kepercayaan Pemerintah (X_6) pada	X _{6.1}	0,731	0,222	VALID
		X _{6.2}	0,274	0,222	VALID
		X _{6.3}	0,512	0,222	VALID
		X _{6.4}	0,254	0,222	VALID
		X _{6.5}	0,752	0,222	VALID
		X _{6.6}	0,650	0,222	VALID
		X _{6.7}	0,512	0,222	VALID
		X _{6.8}	0,599	0,222	VALID
7	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Y.1	0,242	0,222	VALID
		Y.2	0,747	0,222	VALID
		Y.3	0,671	0,222	VALID
		Y.4	0,372	0,222	VALID

	Y.5	0,658	0,222	VALID
	Y.6	0,437	0,222	VALID

Sumber: Data Olahan SPSS, 2020.

Pada tabel 4.20 uji validitas menunjukan bahwa r_{hitung} variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, Kepercayaan pada Pemerintah dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih besar dibanding r_{tabel} . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dan item yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, Kepercayaan pada Pemerintah dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan valid.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah *Cronbach Alpha* dengan cara membandingkan nilai *alpha* dengan standarnya. Koefisien *Cronbach Alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukan keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitas.

Tabel 4.21
Hasil Uji Reliabilitas

N o	Variabel	Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,630	0,60	Reliabel
2.	Tingkat Pendidikan(X_2)	0,652	0,60	Reliabel
3.	Pendapatan (X_3)	0,632	0,60	Reliabel
4.	Norma Sosial(X_4)	0,783	0,60	Reliabel
5.	Sanksi Pajak (X_5)	0,862	0,60	Reliabel
6	Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_6)	0,631	0,60	Reliabel
7.	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Y)	0,720	0,60	Reliabel

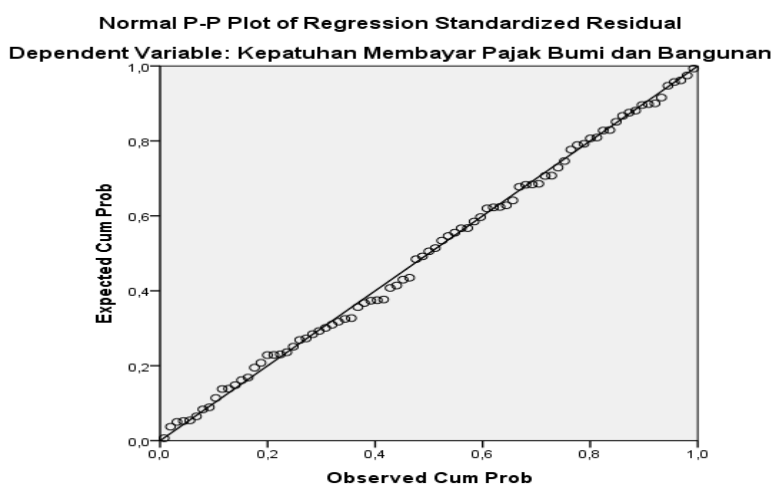
Sumber: Data Olahan SPSS, 2019.

Pada tabel 4.21 uji releabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, Kepercayaan pada Pemerintah dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

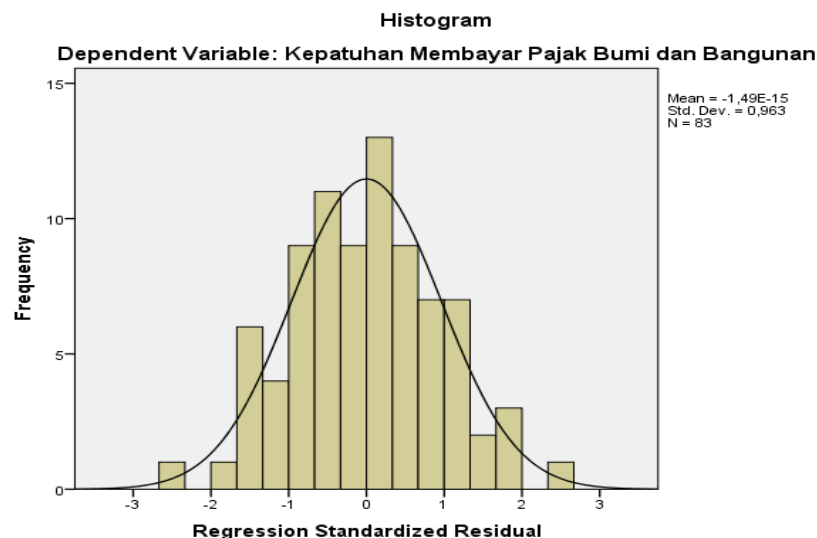
4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode grafik normal P-plot dan grafik histogram.



(Gambar 4.2 Uji Normalitas)



(Gambar 4.3 Grafik Histogram)

Berdasarkan tampilan grafik normal P-plot di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan pada grafik histogram terlihat bahwa grafik memberikan pola distribusi yang normal.

4.2.3.2 Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (dependen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas didalam regresi dapat dilihat dari nilai *toleran* dan *variance inflation factor (VIF)*.

Tabel 4.22
Uji Multikolineritas

Collinearity Statistics			
Variabel	Toleran	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,718	1,393	Bebas Multikolineritas
Tingkat Pendidikan(X_2)	0,394	2,541	Bebas Multikolineritas
Pendapatan (X_3)	0,665	1,503	Bebas Multikolineritas
Norma Sosial(X_4)	0,828	1,208	Bebas Multikolineritas
Sanksi Pajak (X_5)	0,333	3,007	Bebas Multikolineritas
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_6)	0,950	1,052	Bebas Multikolineritas

*Dependen Variabel: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Sumber: Data Olahan SPSS, 2020.*

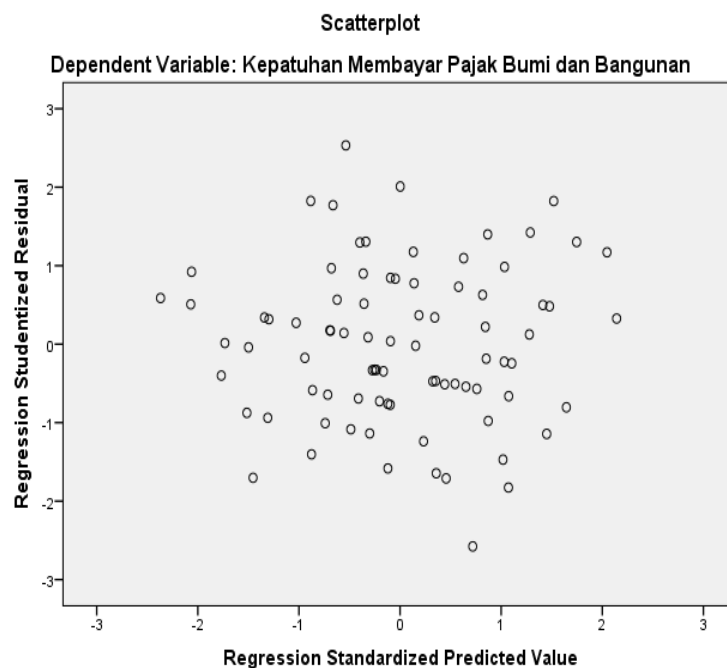
Pada tabel 4.22 hasil perhitungan nilai VIF pada Full model menunjukan bahwa tidak ada nilai $VIF > 10$ sehingga mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa pada full model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas.

4.2.3.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain sama maka disebut *homoskedastisitas*. Sebaliknya, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak sama maka disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara prediksi nilai variabel terikat dengan residualnya. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghazali (2016: 134) yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas



(Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas)

Hasil yang ditampilkan pada gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk memprediksi dependen berdasarkan masukan variabel-variabel independen yang digunakan.

4.2.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi, melalui model tabel *durbin watson*. Dimana secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut (Santoso, 2004):

- a. Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif.
- b. Jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi negatif.

- c. Jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.23
Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	1,872	Tidak Ada Autokorelasi
Tingkat Pendidikan(X_2)		
Pendapatan (X_3)		
Norma Sosial(X_4)		
Sanksi Pajak (X_5)		
Kepercayaan Pada Pemerintah (X_6)		

Dependen Variabel: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Data Output SPSS, 2020.

Dari tabel 4.23 di atas, menunjukan bahwa nilai Durbin Watson (DW) pada variabel dependen menunjukan nilai 1,872 dengan berkisar antara -2 sampai dengan +2, berarti autokorelasi tidak ada pada variabel regresi atau independen.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

4.2.4.1 Persamaan Regresi

Penelitian ini mempunyai hipotesis yang diuji dengan menggunakan regresi berganda. Pengujian hipotesis pertama tentang Kesadaran Wajib Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Kedua Tingkat Pendidikan (X_2) Pendapatan (X_3) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Keempat Norma Sosial (X_4) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Y). Kelima Sanksi Pajak (X_5) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Keenam Kepercayaan pada Pemerintah (X_6) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Berdasarkan pada pengolahan data menggunakan software SPSS versi 23 maka didapatkan suatu model regresi berganda berikut:

Tabel 4.24
Koefisien Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	12,761	5,886	
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	-0.153	0,116	0,154
Tingkat Pendidikan (X ₂)	0,577	0,240	0,377
Pendapatan (X ₃)	0,624	0,130	0,577
Norma Sosial (X ₄)	-0,038	0,141	0,029
Sanksi Pajak (X ₅)	0,590	0,251	0,402
Kepercayaan Pada Pemerintah (X ₆)	-0,041	0,102	0,041

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Data Olahan SPSS, 2020.

Dari tabel diatas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

$$Y = 12,761 - 0,153X_1 + 0,577X_2 + 0,624X_3 - 0,038X_4 + 0,590X_5 - 0,041X_6 + e$$

Adapun penjelasan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

a = Konstanta = 12,761

Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 12,761 besarnya Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Apabila Kesadaran Wajib Pajak (X₁), Tingkat Pendidikan (X₂), Pendapatan (X₃), Norma Sosial (X₄), Sanksi Pajak (X₅), Kepercayaan pada Pemerintah (X₆) adalah konstan, maka Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Y) sebesar 12,761.

β_1 = Koefisien regresi X₁ = -0,153

Nilai Koefisien regresi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁) adalah sebesar -0,153, menyatakkan bahwa setiap kenaikan Kesadaran Wajib Pajak sebesar satu satuan akan menurunkan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Y) sebesar 0,153.

β_2 = Koefisien regresi $X_2 = 0,577$

Nilai Koefisien regresi pada variabel Tingkat Pendidikan (X_2) adalah sebesar = 0,577, menyatakan bahwa setiap Kenaikan Tingkat Pendidikan sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaan(Y) sebesar 0,577.

β_3 = Koefisien regresi $X_3 = 0,624$

Nilai Koefisien regresi pada variabel Pendapatan (X_3) adalah sebesar = 0,624. menyatakan bahwa setiap kenaikan Pendapatan sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaan(Y) sebesar 0,624.

β_4 = Koefisien regresi $X_4 = -0,038$

Nilai Koefisien regresi pada variabel Norma Sosial (X_4) adalah sebesar = -0,038, menyatakan bahwa setiap kenaikan Norma Sosial sebesar satu satuan akan menurunkanKepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaan(Y) sebesar 0,038.

β_5 = Koefisien regresi $X_5 = 0,590$

NilaiKoefisien regresi pada variabel Sanksi Pajak (X_5) adalah sebesar =0,590. menyatakan bahwa setiap kenaikan Sanksi Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaan(Y) sebesar 0,590.

β_6 = Koefisien regresi $X_6 = -0,041$

Koefisien regresi pada variabel Kepercayaan pada pemerintah (X_6) adalah sebesar =-0,041. menyatakan bahwa setiap kenaikan Kepercayaan pada pemerintah sebesar satu satuan akan menurunkanKepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaan(Y) sebesar 0,041.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji *t*

Uji *t* parsial dalam analisis regresi analisis berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (*X*) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (*Y*). Uji *t* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini uji *t* yang dihasilkan:

Tabel 4.25
Nilai Koefisien *t*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,761	5,886		2,168	0,033
Kesadaran Wajib Pajak (<i>X</i> ₁)	-.153	0,116	-.0154	-1,323	0,130
Tingkat Pendidikan (<i>X</i> ₂)	0,577	0,240	0,377	2,401	0,019
Pendapatan (<i>X</i> ₃)	0,624	0,130	0,577	4,785	0,000
Norma Sosial (<i>X</i> ₄)	-.038	0,141	0,029	-,267	0,090
Sanksi Pajak (<i>X</i> ₅)	0,590	0,251	0,402	2,355	0,021
Kepercayaan Pada Pemerintah (<i>X</i> ₆)	-,041	0,102	0,041	-,402	0,079

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Data Olahan SPSS, 2020.

Untuk mencari *t* tabel dengan $df = n - 2$, taraf nyata 5% dapat dengan menggunakan tabel statistic. Nilai *t* tabel dapat dilihat dengan menggunakan *t* tabel. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- Jika *t* hitung $> t$ tabel, maka *H*_a diterima dan *H*₀ ditolak.
- Jika *t* hitung $< t$ tabel, maka *H*_a ditolak dan *H*₀ diterima.

Tabel 4.26
Uji *t*

Variabel	<i>t</i> hitung	<i>t</i> tabel	Nilai Signifikan	Keterangan
<i>X</i> ₁	1,323	1,991	0,130 > 0.050	<i>H</i> ₀ diterimadan <i>H</i> ₁ ditolak
<i>X</i> ₂	2,401	1,991	0,019 < 0.050	<i>H</i> ₀ ditolak dan <i>H</i> ₂ diterima
<i>X</i> ₃	4,785	1,991	0,000 < 0.050	<i>H</i> ₀ ditolak dan <i>H</i> ₃ diterima
<i>X</i> ₄	0,267	1,991	0,090 > 0.050	<i>H</i> ₀ diterima dan <i>H</i> ₄ ditolak
<i>X</i> ₅	2,355	1,991	0,021 < 0.050	<i>H</i> ₀ ditolak dan <i>H</i> ₅ diterima
<i>X</i> ₆	0,402	1,991	0,079 > 0.050	<i>H</i> ₀ diterima dan <i>H</i> ₆ ditolak

Sumber: Data Olahan SPSS, 2020.

1) Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 4.25 didapat nilai t hitung 1,323 dan signifikan 0,130.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$T \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$T \text{ tabel} = 0,05/2 ; 83 - 7$$

$$T \text{ tabel} = 0,025 ; 76$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,991.

Nilai t hitung $1,323 < t \text{ tabel } 1,991$ dan nilai signifikan $0,130 > 0,050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya Kesadaran Wajib Pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Y).

2) Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 4.18 didapat nilai t hitung 2,401 dan signifikan 0,019.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$T \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$T \text{ tabel} = 0,05/2 ; 83 - 7$$

$$T \text{ tabel} = 0,025 ; 76$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,991.

Nilai t hitung $2,401 > t \text{ tabel } 1,991$ dan nilai signifikan $0,019 < 0,050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang artinya Tingkat Pendidikan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Y).

3) Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 4.18 didapat nilai t hitung 4,785 dan signifikan 0,000.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$T \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$T \text{ tabel} = 0,05/2 ; 83 - 7$$

$$T \text{ tabel} = 0,025 ; 76$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,991.

Nilai t hitung $4,785 > t \text{ tabel } 1,991$ dan nilai signifikan $0,000 < 0.050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang artinya Pendapatan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Y).

4) Hipotesis Keempat

Berdasarkan tabel 4.18 didapat nilai t hitung 0,267 dan signifikan 0,090.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$T \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$T \text{ tabel} = 0,05/2 ; 83 - 7$$

$$T \text{ tabel} = 0,025 ; 76$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,991,

Nilai t hitung $0,267 < t \text{ tabel } 1,991$ dan nilai signifikan $0,090 > 0.050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_4 ditolak, yang artinya Norma Sosial (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Y).

5) Hipotesis Kelima

Berdasarkan tabel 4.18 didapat nilai t hitung 2,355 dan signifikan 0,021.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$T \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$T \text{ tabel} = 0,05/2 ; 83 - 7$$

$$T \text{ tabel} = 0,025 ; 76$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,991.

Nilai t hitung $2,355 > t$ tabel 1,991 dan nilai signifikan $0,021 < 0.050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima, yang artinya Sanksi Pajak (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Y).

6) Hipotesis Keenam

Berdasarkan tabel 4.18 didapat nilai t hitung 0,402 dan signifikan 0,079.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$T \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$T \text{ tabel} = 0,05/2 ; 83 - 7$$

$$T \text{ tabel} = 0,025 ; 76$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,991.

Nilai t hitung $0,402 < t$ tabel 1,991 dan nilai signifikan $0,079 > 0.050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_5 ditolak, yang artinya Kepercayaan Pada Pemerintah (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Y).

4.2.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R-square menunjukkan persentase seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Berikut ini koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan:

Tabel 4.27
Nilai Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,514 ^a	,264	,206	2,968523	1,872

a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

b. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, pendapatan, norma sosial, sanksi pajak, kepercayaan pada pemerintah

Sumber: Data Olahan Spss, 2020.

Berdasarkan tabel 4.27 diatas nilai Untuk menghitung besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Tingkat Pendidikan (X_2), Pendapatan (X_3), Norma Sosial (X_4), Sanksi Pajak (X_5), dan Kepercayaan pada Pemerintah (X_6) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaan(Y) dengan menggunakan angka R Square (angka korelasi yang dikuadratkan). Angka R Square disebut juga *Koefisiensi Determinasi* (KD). Besarnya angka Koefisiensi Diterminasi dalam perhitungan di atas ialah sebesar 0,206atau sama dengan 20,6% (Rumus untuk menghitung koefisiensi determinasi *Model Summaryb*, ialah *Adjusted r^2 x 100 %*). Angka tersebut mempunyai arti bahwa, besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Tingkat Pendidikan (X_2), Pendapatan (X_3), Norma Sosial (X_4), Sanksi Pajak (X_5), dan Kepercayaan pada Pemerintah (X_6) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah 20,6% sedangkan 79,4% sisanya yaitu dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaanpada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaan. Hal ini ditunjukkan Nilai t hitung $-1,323 < t$ tabel $1,991$ dan nilai signifikan $0,130 > 0.050$, maka menunjukkan kesadaran wajib pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y) dapat disimpulkan H_1 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunanPerdesaaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kesadaran Wajib Pajak tidakberpengaruhterhadapKepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaan, terdapat nilai minus yang artinya semakin rendahnya kesadaran seseorang untuk membayar pajak maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas, Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Perpajakan Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga Kesadaran wajib pajak dan kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan oleh penelitian terdahulu Juwanti (2017) dan Musthofa (2011) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak membayar pajak Bumi dan Bangunan.

4.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaanpada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaan, Hal ini ditunjukan oleh Nilai t hitung $2,401 > t \text{ tabel } 1,991$ dan nilai signifikan $0,019 < 0.050$, maka menunjukkan Jangka Tingkat Pendidikan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) dapat disimpulkan H_2 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikanberpengaruhpositif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunanPerdesaaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Masyarakat yang pendidikannya tinggi tidak akan menemui kesulitan dalam hal pentingnya konsep dasar perpajakan, dan untuk masyarakat yang berpendidikan rendah inilah seharusnya petugas pajak harus lebih efektif lagi dalam bersosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang arti pentingnya konsep dasar perpajakan di Indonesia, hal ini untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Masyarakat yang pendidikannya tinggi tidak akan menemui kesulitan dalam hal arti pentingnya konsep dasar perpajakan, dan untuk masyarakat yang berpendidikan rendah inilah seharusnya petugas pajak harus lebih efektif lagi dalam bersosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang arti pentingnya konsep dasar perpajakan di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan teori Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Sisdiknas no 20 tahun 2003)

Hasil penelitian ini didukung dengan oleh penelitian terdahulu Dermawan (2015) dan Rahman (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, Hal ini ditunjukkan oleh Nilai t hitung $4,785 > t$ tabel $1,991$ dan nilai signifikan $0,000 < 0.050$, maka menunjukkan Pendapatan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y) disimpulkan H_3 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan hal ini dikarenakan semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya

dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penghasilan yang diperoleh masyarakat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat konsumsi masyarakat disesuaikan dengan tingkat penghasilan. Dengan tingkat penghasilan yang tinggi orang akan patuh melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena secara ekonomi kebutuhan mereka telah terpenuhi. Dalam penelitian ini penghasilan terdiri dari penghasilan pokok dan penghasilan sampingan yang berasal dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah.

Penghasilan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar Negara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakannya untuk membayar pajak. Asumsinya seseorang yang berpenghasilan besar yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seharusnya akan dapat membayar pajak, termasuk didalamnya harus ada kesadaran diri untuk membayar pajak.

Hal ini sesuai dengan teori Sudarsono (2007: 68) yang mengatakan bahwa Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Hasil penelitian ini didukung dengan oleh penelitian terdahulu Dermawan (2015) dan Rahman(2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Norma Sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.. Hai ini ditunjukkan oleh Nilai t hitung $0,267 < t \text{ tabel } 1,991$ dan nilai signifikan $0,090 > 0.050$, maka menunjukkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Y) dapat disimpulkan H_4 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa variabel Norma Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

Ini berarti bahwa semakin rendah norma sosial seseorang maka semakin tinggi pula Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik norma sosial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, terdapat nilai minus yang artinya rendahnya norma sosial seseorang maka akan menurunkan kepatuhannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Norma sosial yang berkembang di masyarakat tidak menentukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena masyarakat cenderung berperilaku sesuai dengan kelompok yang ada di sekitarnya. Individu yang telah terpengaruh oleh norma sosial akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya apabila norma sosial yang berkembang patuh pada pembayaran pajak (Iyer, 2016).

Hasil penelitian ini didukung dengan oleh penelitian terdahulu Juwanti (2017) yang menyatakan bahwa Norma Sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

4.3.5 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaanpada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunanPerdesaaan dan Perkotaan, Hal ini ditunjukan oleh Nilai t hitung $2,355 > t$ tabel $1,991$ dan nilai signifikan $0,021 < 0.050$, maka menunjukkan Sanksi Pajak (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y) dapat disimpulkan H_5 diterima. dan dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunanPerdesaaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadapKepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan hal Perdesaaan dan Perkotaan ini dikarenakan semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka tentunya akan semakin meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib tidak melanggar norma perpajakan.

Hal ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2013: 59) yang mengatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Hasil penelitian ini didukung dengan oleh penelitian terdahulu Dwi Setiono (2018) dan Muslim (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak.

4.3.6 Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, Hal ini ditunjukkan oleh Nilai t hitung $0,402 < t$ tabel $1,991$ dan nilai signifikan $0,079 > 0.050$, maka menunjukkan kepercayaan pada pemerintah (X_5)

tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Y) dapat disimpulkan H₆ ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa variabel Kepercayaan Pada Pemerinta tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, terdapat nilai minus yang artinya semakin rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah maka akan semakin menurunkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat Kepercayaan wajib pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Fokus utama tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani dkk, 2012). Kepercayaan (*trust*) didefinisikan sebagai kepercayaan yang timbul karena pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggungjawab pemberi barang dan jasa. Kepercayaan merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk melakukan pertukaran dengan partner yang dipercaya, karena keandalan dan integritasnya. Kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif.

Hasil penelitian ini didukung dengan oleh penelitian terdahulu Juwanti(2017) dan Setiono(2018) yang menyatakan bahwa variabel kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.
2. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, dengan pengaruh sebesar 0,577 atau 57,7%
3. Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, dengan pengaruh sebesar 0,624 atau 62,4%
4. Norma Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.

5. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, dengan pengaruh sebesar 0,590 atau 59%.
6. Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian berikutnya antara lain:

1. Bagi Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan dan perlu ditingkatkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian dan tidak hanya pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, tetapi dapat dilakukan pada objek penelitian yang jumlah wajib pajaknya lebih banyak lagi.
3. Sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai prosedur dan tata cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh pemerintah desa.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak memasukkan variabel norma sosial.

5. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan memperluas sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2013. Yogyakarta: Andi
- Rahayu, Siti Kurnia 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan. Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rahayu, Siti Kurnia 2017. *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL) : Konsep dan. Aspek Formal*, Rekayasa Sains : Bandung
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo Hari Adi. 2009. *"Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar"*, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II
- Safri Nurmantu, 2005. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Soemitro, Rocmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama, Bandung
- Sophar Lumbantoruan. 1996. *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Gramedia
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Ekonisia
- Sudjana, 2000. *Statistika Untuk Ekonomi dan Niaga 1*. Bandung: Tarsito

Jurnal:

- Handayani. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Artikel Publikasi. Universitas Soedirman*.
- Imam Oktafiyanto. 2015. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Vol 3 No.1.

- Imaniyah, Nur dan Bestari Dwi Handayani. 2008. *Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan*. Jurnal Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makasar.Vol 2 No. 1.
- Pranadata, I Gede Putu. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 2 No. 2. Hal. 1-16
- Rahman, Arif. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*.Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Vol 6 No.1.
- Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Vanli Tuwo. 2016. *Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon*. Jurnal Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 4 No.1.
- Yusnidar, Johan, dkk. 2015. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*.Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015.

Skripsi:

- Agus, Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Darmawan, REZA. 2015. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) (Studi kasus: Pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang
- Juwanti, Febriani Ramadhani. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Khoirul Musthofa (2011). *Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan*

Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009. Tesis. Universitas Negeri Semarang.

Muslim, Yusron Khoirul. 2018. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. Skripsi Universitas Islam Indonesia.

Sapriadi, Doni. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB(Pada Kecamatan Selupu Rejang)*. Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Setiono, Sujatmiko Dwi. 2018. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan(Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). Universitas Islam Indonesia

Syamsu Alam. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN 1.**KUESIONER**

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

I. Petunjuk Pengisian

1. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner dimohonkan kepada responden terlebih dahulu mengisi identitas sesuai dengan formulir isian yang disediakan.
2. Bacalah pertanyaan secara teliti dan berikan tanda (X) pada salah satu alternative jawaban yang dianggap benar.
3. Dimohonkan untuk mencoba menganalisis pertanyaan secara intensif dan jawaban sesuai dengan pendapat sendiri tanpa paksaan pihak manapun, karena tidak ada pertanyaan yang benar atau salah.
4. Dimohonkan untuk tidak mendiskusikan pertanyaan dengan pihak lain.

II. Identitas Responden

1. Nama :(Boleh tidak diisi)
2. Nomor Reponden :
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki,
☐ Perempuan
4. Umur : ☐ ≤ 35 Tahun
☐ 36 – 50 Tahun
☐ > 50 Tahun
5. Pekerjaan : ☐ PNS ☐ Petani
☐ Karyawan swasta ☐ Lainnya ☐
☐ Wirausaha ☐
6. Pendidikan : ☐ SD ☐ S1
☐ SMP ☐ S2 ☐
☐ SMA ☐

7. Pendapatan/Bulan : ☐ < Rp1.000.000
 Rp1.000.000 – Rp2.000.000 ☐
☐ > Rp2.000.000

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pertanyaan dengan kriteria sebagai berikut :

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

KS = Kurang Setuju

A. Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Kesadaran akan fungsi pajak					
1	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
2	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan						
3	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara					
4	Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara.					
Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan						
5	Pajak bumi dan bangunan digunakan sebagai pendapatan daerah					
6	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.					
Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang						
7	Adanya Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku					
8	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.					

Sumber: Fitra (2010) dan Alfiah (2014).

B. Tingkat Pendidikan (X₂)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Pendidikan dasar					
1	Saya taat membayar pajak meskipun tidak menyelesaikan sekolah dasar					
2	Saya taat membayar pajak meskipun hanya tamatan sekolah dasar					
Pendidikan menengah						
3	Saya taat membayar pajak meskipun hanya tamatan sekolah menengah pertama					
4	Saya taat membayar pajak karena saya berpendidikan sekolah menengah atas					
Pendidikan tinggi						
5	Saya taat membayar pajak karena saya berpendidikan diploma					
6	Saya taat membayar pajak karena saya berpendidikan sarjana					

Sumber : Purnama (2015)

C. Pendapatan (X₃)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Pendapatan pokok					
1	Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan pokok rendah					
2	Pendapatan saya saat ini dapat memenuhi kewajiban seperti membayar pajak bumi bangunan					
Pendapatan Sampinganan						
3	Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan tambahan saya kecil					
4	Saya selalu taat membayar pajak meskipun tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk memperoleh pendapatan tambahan					
Pendapatan lain-lain						
5	Besar kecilnya pendapatan saya tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak					

6	Meski saya tidak memiliki pendapatan lain selain gaji pokok namun saya tetap taat membayar pajak bumi dan bangunan					
---	--	--	--	--	--	--

Sumber: Ernawati (2014)

D. Norma Sosial (X₄)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Taat membayar pajak karena ingin menjadi contoh bagi lingkungan rumah					
1	Saya taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena ingin menjadi contoh yang baik kepada anak-anak saya					
2	Saya ingin membantu pemerintah untuk ikut serta mensosialisasikan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada lingkungan rumah saya					
Merasa malu dengan lingkungan sekitar jika tidak membayar pajak						
3	Saya merasa malu dengan lingkungan rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)					
4	Saya merasa malu dengan tetangga sekitaran rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)					
Taat membayar pajak karena dorongan dari lingkungan sekitar						
5	Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tetangga dan kerabat saya melakukan hal sama (taat membayar pajak).					
6	Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tidak mau dikenai denda					

Sumber: Juwanti (2017)

E. Sanksi Pajak (X₅)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Sanksi Administrasi					
1	Sanksi pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak agar tercipta kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara					

2	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi administrasi jika tidak membayar atau telat membayar pajak PBB					
3	Sanksi Denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran adalah wajar					
Sanksi Pidana						
4	Sanksi Denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan maka diberi sanksi pidana					
5	pengenaan sanksi pajak PBB harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran					
6	Apabila melakukan pelanggaran yang merugikan Negara secara material maka dikenai sanksi denda/pidana					

Sumber: Khoiroh (2017) Juwanti (2017)

F. Kepercayaan pada pemerintah (X₆)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Kepercayaan pada pemerintah					
1	Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digunakan untuk pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah					
2	Saya percaya bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggung jawab					
Kepercayaan pada sistem hukum						
3	Saya percaya undang-undang yang mengatur perpajakan					
4	Saya percaya Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana					
Kepercayaan pada lembaga peradilan						
5	Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas telah dijatuhi hukuman secara adil					
6	Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan wajib pajak telah dijatuhi hukuman secara adil					

Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat						
7	Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah					
8	Saya percaya ada petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kesejahteraan					

Sumber: Juwanti (2017)

G. Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Kepatuhan perpajakan formal					
1	Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu					
2	Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus					
3	Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar					
Kepatuhan perpajakan material						
4	Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu					
5	Keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan dikenakan sanksi					
6	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut					

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA PENELITIAN

KESADARAN WAJIB PAJAK (X₁)

Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)								
p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	Total
5	4	3	4	4	3	4	4	31
4	4	4	4	3	3	4	2	28
3	4	5	4	5	3	4	4	32
5	3	3	4	4	4	3	3	29
3	3	4	5	4	3	5	5	32
4	3	5	4	5	4	4	4	33
3	5	4	4	3	3	3	2	27
3	3	3	3	4	3	2	2	23
4	4	4	4	5	4	5	5	35
4	2	3	3	4	3	4	4	27
3	4	3	4	4	3	4	2	27
4	4	4	4	4	2	4	2	28
5	2	2	4	3	2	4	4	26
3	4	4	4	4	4	5	3	31
4	4	2	4	3	5	5	3	30
3	4	5	4	5	4	4	3	32
4	3	4	2	5	2	5	5	30
3	2	4	2	5	3	4	2	25
3	2	4	2	4	4	3	3	25
4	4	4	4	4	4	3	3	30
2	4	4	4	4	4	3	3	28
3	5	5	5	5	5	2	2	32
4	4	4	3	4	4	3	3	29
5	5	5	5	5	3	2	2	32
2	5	4	5	5	3	2	2	28
4	4	4	4	4	4	3	3	30
5	5	5	5	5	3	2	2	32
4	4	2	4	3	3	5	3	28
5	5	5	5	5	5	5	3	38
5	4	4	3	4	5	4	4	33
2	4	4	4	3	3	4	2	26

4	4	5	3	5	3	4	2	30
3	3	3	4	4	4	3	3	27
3	3	4	5	4	3	5	5	32
4	3	5	3	5	4	4	4	32
5	5	4	4	3	5	3	1	30
3	3	3	3	4	3	3	5	27
3	4	4	4	5	4	3	1	28
2	4	3	3	4	5	4	2	27
3	3	3	4	4	3	4	2	26
4	4	4	3	4	2	4	2	27
3	3	4	4	3	2	4	4	27
4	4	4	3	4	4	3	5	31
4	4	2	4	3	3	3	3	26
3	5	5	5	5	3	3	3	32
4	3	4	2	5	2	3	3	26
4	5	4	2	5	3	4	4	31
4	2	4	2	4	4	3	3	26
4	4	4	3	3	3	3	3	27
4	3	4	4	4	4	3	3	29
4	5	4	5	3	4	2	2	29
3	4	3	4	3	4	3	3	27
4	3	5	4	3	4	2	2	27
4	2	4	3	3	3	2	2	23
4	4	3	4	3	4	3	3	28
3	5	4	5	4	4	2	2	29
4	4	2	4	3	3	3	1	24
5	5	5	5	5	3	3	1	32
5	4	4	3	4	3	4	2	29
4	4	4	3	3	3	3	2	26
3	4	5	3	5	3	4	4	31
4	3	3	3	4	4	3	3	27
3	3	4	5	4	3	3	3	28
4	3	5	3	5	3	3	4	30
5	5	4	3	3	3	3	3	29
3	3	3	3	4	4	4	2	26
4	4	4	3	5	4	5	3	32
4	3	3	3	4	3	3	2	25

3	4	3	4	4	3	4	3	28
4	3	4	3	4	2	3	4	27
3	4	3	3	3	2	4	2	24
3	3	4	2	4	4	3	5	28
4	4	2	4	3	3	3	5	28
3	4	3	5	3	4	3	4	29
3	3	4	2	5	2	3	5	27
4	5	3	2	5	3	4	4	30
3	2	4	2	4	4	3	3	25
4	4	3	3	4	4	3	3	28
4	2	4	3	4	3	3	3	26
4	4	5	3	5	4	2	2	29
3	4	3	4	4	3	4	3	28
4	3	3	3	4	5	4	2	28
4	4	3	4	4	3	4	3	29

TINGKAT PENDIDIKAN (X₂)

Tingkat Pendidikan (X2)						
p1	p2	p3	p4	p5	p6	Total
4	5	4	5	5	3	26
3	4	4	4	5	4	24
4	5	4	4	4	4	25
3	2	3	4	4	4	20
3	4	4	3	4	3	21
3	5	4	4	3	3	22
4	4	3	2	4	3	20
4	2	3	3	3	5	20
5	4	4	2	4	4	23
2	5	5	2	3	4	21
4	3	3	4	4	4	22
3	5	3	2	3	5	21
3	4	3	4	4	2	20
4	3	3	2	3	4	19
2	4	4	4	4	2	20
5	3	5	4	5	4	26
2	3	3	5	5	4	22
5	4	5	5	5	4	28
3	3	4	2	4	4	20
2	4	4	4	4	3	21
2	2	3	3	5	3	18
4	3	3	3	3	4	20
5	4	4	4	4	4	25
4	4	3	5	3	4	23
5	3	4	3	2	3	20
3	4	3	4	4	3	21
4	4	3	2	5	3	21
3	3	4	4	5	5	24
5	3	3	3	4	4	22
4	2	5	4	5	3	23
2	4	4	2	4	4	20
3	3	3	2	3	4	18
3	5	4	4	4	4	24
3	4	3	3	3	3	19
3	3	4	4	4	3	21

4	5	4	4	3	3	23
3	3	3	3	4	5	21
3	3	4	4	4	4	22
4	3	5	4	4	4	24
3	4	4	4	3	4	22
2	3	5	3	4	5	22
3	4	4	4	4	2	21
4	4	3	3	3	5	22
2	4	4	4	4	5	23
3	5	3	5	5	5	26
3	2	4	3	3	4	19
3	4	5	5	5	4	26
4	2	3	4	3	4	20
4	4	2	4	4	3	21
4	3	5	3	3	3	21
4	5	5	3	3	4	24
3	2	3	4	4	4	20
2	4	4	5	5	4	24
5	3	2	3	2	3	18
3	4	3	4	4	3	21
2	4	4	4	3	3	20
3	3	3	3	5	2	19
3	2	3	5	3	4	20
4	3	3	3	3	3	19
3	3	2	4	5	4	21
3	3	4	2	3	4	19
3	5	5	2	4	4	23
3	3	2	3	3	3	17
3	5	4	2	4	3	21
3	3	5	4	3	3	21
4	3	5	3	4	2	21
3	3	4	3	3	4	20
3	3	3	2	3	2	16
4	4	3	3	4	4	22
3	3	3	4	3	5	21
4	4	3	3	4	2	20
3	3	3	4	3	5	21

2	3	3	2	4	2	16
3	3	3	5	3	5	22
3	3	5	3	3	4	21
3	4	5	5	3	4	24
3	3	3	3	4	4	20
3	4	2	2	4	3	18
2	3	3	3	3	3	17
4	5	3	3	3	4	22
3	3	4	5	2	4	21
3	2	2	3	4	3	17
3	3	3	4	3	3	19

PENDAPATAN (X₃)

Pendapatan (X3)						
p1	p2	p3	p4	p5	p6	Total
4	4	3	5	5	4	25
4	4	4	5	5	4	26
4	5	4	3	4	2	22
3	4	4	5	4	3	23
4	3	4	3	5	4	23
4	4	5	4	5	4	26
3	3	3	3	4	4	20
2	4	2	4	3	3	18
3	3	5	5	4	5	25
4	4	2	4	3	4	21
2	3	3	3	4	4	19
4	4	1	3	3	4	19
3	3	2	3	4	5	20
4	4	3	2	3	5	21
4	4	2	3	4	5	22
3	5	5	4	5	4	26
3	5	5	3	2	5	23
3	5	4	2	3	5	22
4	4	2	3	4	3	20
4	3	4	3	4	4	22
5	4	5	4	3	4	25
5	4	5	3	4	4	25
5	3	4	2	3	2	19
4	4	5	3	4	3	23
5	3	5	4	5	4	26
4	3	4	2	2	4	19
4	4	5	5	4	4	26
1	3	4	3	3	3	17
5	3	5	2	4	5	24
3	3	3	5	3	4	21
3	4	4	3	3	4	21
4	5	4	4	4	2	23
3	4	4	3	4	3	21
3	1	4	5	5	4	22
3	1	5	3	5	1	18

3	4	5	2	4	4	22
2	2	2	4	1	3	14
3	5	3	3	4	5	23
3	4	2	4	1	4	18
2	2	3	4	4	4	19
4	4	1	3	5	4	21
3	2	2	4	4	5	20
3	2	3	5	3	5	21
3	4	2	3	1	5	18
3	3	5	2	5	4	22
3	3	3	5	2	5	21
5	3	4	3	5	5	25
4	4	2	2	4	3	19
4	4	4	1	3	4	20
3	2	3	4	4	4	20
3	4	5	4	4	4	24
3	5	4	3	5	2	22
4	4	3	2	4	3	20
5	5	5	2	5	4	26
4	5	4	4	5	4	26
4	4	3	2	4	4	21
1	3	4	5	3	3	19
5	3	3	3	5	5	24
4	3	3	4	2	4	20
4	4	4	3	5	4	24
4	1	3	1	3	2	14
3	4	4	4	1	3	19
3	1	4	3	2	4	17
4	3	3	4	5	4	23
3	3	5	5	4	4	24
2	3	2	2	4	3	16
3	5	3	3	2	5	21
3	3	2	5	4	4	21
2	4	3	3	4	4	20
4	2	2	3	2	4	17
3	4	2	5	4	5	23
3	2	3	4	5	5	22

4	3	2	3	1	5	18
3	4	5	4	5	4	25
3	3	5	1	5	5	22
5	3	4	2	5	5	24
3	4	2	3	4	3	19
4	1	4	2	4	4	19
3	4	3	4	3	1	18
3	4	5	3	2	4	21
4	4	5	2	4	4	23
3	5	3	3	2	1	17
3	3	3	3	3	4	19

Norma Sosial (X₄)

Norma Sosial (X ₄)						
p1	p2	p3	p4	p5	p6	Total
5	5	5	4	5	3	27
5	4	4	4	5	2	24
3	4	4	4	4	3	22
4	5	2	4	5	2	22
5	4	4	2	4	2	21
5	5	4	5	3	3	25
3	3	4	2	3	4	19
5	5	5	5	2	5	27
5	1	5	4	3	5	23
4	3	5	3	4	4	23
4	3	5	3	4	4	23
4	5	5	4	3	4	25
4	1	5	3	4	4	21
4	3	3	3	3	5	21
3	3	3	3	4	5	21
4	3	2	3	5	5	22
4	5	3	4	3	5	24
4	1	3	3	3	4	18
4	3	4	5	3	5	24
4	3	2	4	2	4	19
5	5	4	2	2	3	21
5	3	4	5	3	4	24
5	4	4	2	5	3	23
5	4	4	5	2	2	22
5	3	4	3	4	2	21
5	4	4	4	4	5	26
4	4	4	2	2	4	20
3	3	2	1	2	3	14
2	3	5	3	5	5	23
5	5	3	4	2	3	22
5	4	4	3	2	2	20
3	4	4	3	4	3	21
3	3	2	4	5	2	19
3	4	4	2	4	2	19
3	3	4	2	1	3	16

3	3	4	4	3	4	21
2	5	5	2	2	5	21
2	4	4	3	3	5	21
4	3	5	3	3	4	22
4	3	4	5	2	4	22
4	3	5	3	4	4	23
4	2	4	3	4	4	21
4	3	3	3	2	5	20
3	3	3	3	4	5	21
4	3	1	3	2	5	18
4	5	3	3	2	5	22
4	2	3	5	5	4	23
4	3	4	5	4	5	25
3	3	1	1	1	4	13
5	2	4	1	2	3	17
3	3	4	3	3	4	20
5	4	4	3	3	3	22
3	4	4	5	5	2	23
3	3	4	3	3	2	18
3	4	4	2	4	5	22
4	4	4	3	2	4	21
3	2	2	2	1	3	13
3	2	5	5	2	2	19
3	3	5	4	3	3	21
5	4	4	2	2	2	19
3	4	4	4	4	3	22
4	3	2	2	3	2	16
3	4	4	2	4	2	19
3	3	4	5	3	3	21
3	3	4	4	3	4	21
5	2	3	2	5	5	22
5	2	3	4	3	5	22
4	2	3	2	2	4	17
4	3	3	5	1	4	20
4	3	5	4	4	4	24
4	2	5	5	2	4	22
4	3	3	3	4	5	22

3	3	3	1	1	5	16
4	3	3	5	1	2	18
4	3	3	3	3	3	19
4	2	3	3	3	4	19
4	3	4	3	4	5	23
4	3	2	4	3	4	20
2	5	4	2	5	3	21
2	3	4	2	3	4	18
4	3	4	3	5	5	24
4	4	5	3	3	2	21
5	4	3	4	3	2	21

SANKSI PAJAK (X₅)

Sanksi Pajak (X ₅)						
p1	p2	p3	p4	p5	p6	Total
4	5	5	5	5	4	28
4	4	4	5	5	5	27
5	5	4	5	4	4	27
5	5	5	4	4	5	28
4	4	4	5	5	4	26
5	5	5	4	4	4	27
2	5	3	2	4	4	20
5	5	3	5	4	5	27
2	5	3	4	3	5	22
5	5	3	4	4	3	24
5	4	3	4	3	5	24
2	5	3	4	4	3	21
4	4	3	4	3	5	23
5	4	3	4	4	3	23
5	2	3	5	4	5	24
4	2	5	5	3	3	22
5	3	2	4	4	4	22
4	2	2	3	4	4	19
2	3	3	4	4	3	19
4	4	5	3	4	4	24
4	3	2	3	3	3	18
3	4	5	4	4	4	24
3	2	3	3	3	3	17
4	4	3	3	4	3	21
3	3	5	4	3	3	21
4	4	3	3	4	2	20
4	3	2	3	3	3	18
4	2	3	3	4	4	20
3	3	2	4	4	3	19
3	3	3	4	3	3	19
4	3	3	4	4	3	21
4	2	3	3	3	4	19
4	4	3	5	4	4	24
4	3	3	3	3	3	19
3	2	3	4	4	4	20

3	2	3	5	4	4	21
4	2	4	5	4	4	23
2	3	3	4	4	3	19
4	2	3	5	4	4	22
4	3	4	5	3	4	23
4	2	3	4	4	3	20
2	3	3	5	3	4	20
4	3	4	5	3	3	22
3	2	3	4	4	3	19
4	3	3	4	4	3	21
3	3	3	4	3	3	19
5	2	4	3	5	2	21
4	3	2	4	4	3	20
5	4	3	3	4	2	21
4	2	2	4	5	3	20
4	4	3	3	3	4	21
4	3	3	4	3	4	21
4	4	2	3	5	5	23
4	2	3	4	4	3	20
4	2	3	4	5	5	23
4	4	3	3	3	4	21
3	2	3	2	4	4	18
4	4	3	3	4	5	23
4	3	3	2	5	3	20
3	2	3	2	4	3	17
4	3	4	2	3	2	18
4	2	3	3	4	5	21
3	3	4	3	3	2	18
5	2	2	4	4	4	21
3	2	3	3	3	2	16
3	3	4	4	4	4	22
4	2	3	3	4	5	21
3	2	2	3	3	4	17
3	3	2	4	4	3	19
3	2	2	3	4	5	19
4	3	4	4	3	3	21
4	3	3	3	5	5	23

3	2	3	3	4	3	18
4	2	2	4	4	5	21
3	3	2	4	5	3	20
4	2	2	3	3	4	18
3	3	3	4	5	5	23
3	2	2	4	5	3	19
3	3	3	4	5	3	21
4	3	3	4	4	3	21
4	2	2	4	4	5	21
3	3	2	5	5	3	21
4	2	3	3	3	3	18

KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X₆)

Kepercayaan pada pemerintah (X ₆)								
p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	Total
4	3	4	4	3	4	3	5	30
4	4	3	4	4	4	4	4	31
4	2	5	5	5	5	4	5	35
4	4	3	3	4	4	4	4	30
2	4	4	3	3	3	3	3	25
4	3	4	5	4	3	2	3	28
4	4	3	4	4	5	3	4	31
3	4	3	4	4	4	5	4	31
4	2	3	3	4	4	3	4	27
4	4	4	4	4	2	4	4	30
4	2	5	3	4	4	3	4	29
4	2	4	4	5	4	5	5	33
3	4	3	4	4	2	4	4	28
4	4	3	5	4	4	4	3	31
2	4	2	4	3	3	3	3	24
4	4	4	3	4	3	3	3	28
3	3	4	4	4	4	4	4	30
3	3	3	3	4	4	4	4	28
4	3	3	4	4	2	4	4	28
4	4	5	4	4	4	3	4	32
3	4	4	3	4	4	4	4	30
4	4	4	4	3	4	4	3	30
4	4	3	5	3	3	4	3	29
3	3	4	4	4	4	4	4	30
4	3	4	5	3	4	4	3	30
3	4	3	3	4	3	3	4	27
4	4	4	3	3	4	4	3	29
4	3	2	5	3	3	4	2	26
4	4	3	3	4	4	4	3	29
4	2	2	5	4	3	3	3	26
2	4	3	3	3	4	3	4	26
2	4	3	2	2	3	2	2	20
2	4	3	3	4	4	3	3	26
3	3	3	3	4	2	3	3	24

4	3	2	5	4	2	4	2	26
4	4	3	3	4	4	4	3	29
4	2	2	4	4	4	3	3	26
2	4	3	3	3	4	3	4	26
2	2	3	3	2	3	2	2	19
2	4	3	3	4	4	3	3	26
3	3	3	4	4	2	3	3	25
3	4	2	4	4	4	3	3	27
5	4	4	4	5	4	4	4	34
5	5	4	3	5	5	4	4	35
5	5	4	5	5	5	3	3	35
4	3	4	4	4	5	3	3	30

KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Y)

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)						
p1	p2	p3	p4	p5	p6	Total
4	4	4	3	4	4	23
5	4	5	3	3	5	25
5	4	4	3	3	5	24
5	3	3	4	3	4	22
3	4	4	4	4	4	23
5	3	3	3	3	4	21
5	3	4	4	4	4	24
3	4	4	5	3	5	24
5	4	4	4	4	5	26
3	4	4	4	4	4	23
5	5	5	5	5	5	30
3	4	3	4	5	3	22
3	4	5	4	4	1	21
5	4	5	4	5	5	28
3	5	4	5	5	5	27
3	5	5	5	5	3	26
3	5	5	5	5	5	28
4	5	5	5	5	5	29
3	5	5	3	5	4	25
4	4	3	4	4	5	24
3	5	5	3	5	3	24
4	3	4	4	3	5	23
3	5	4	3	5	3	23
4	3	3	4	3	5	22
3	5	5	4	5	5	27
4	4	5	3	4	3	23
3	5	5	3	5	5	26
3	4	4	5	3	2	21
4	5	5	4	5	5	28
4	4	4	3	4	4	23
3	4	5	3	3	5	23
4	4	4	3	3	5	23
3	3	3	4	3	4	20
4	4	4	4	4	2	22
3	3	3	3	3	4	19

4	3	4	4	4	4	23
3	4	4	5	3	5	24
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	4	4	24
3	5	5	5	5	5	28
4	4	3	4	5	3	23
4	4	5	4	4	1	22
3	4	5	4	5	5	26
3	5	4	5	5	3	25
4	5	5	5	5	3	27
4	5	5	5	5	5	29
3	5	5	5	5	5	28
4	5	5	3	5	4	26
4	4	3	4	4	5	24
3	5	5	3	5	5	26
3	3	4	4	3	3	20
4	5	4	3	5	3	24
3	3	3	4	3	5	21
4	5	5	4	5	3	26
3	4	5	3	4	5	24
4	5	5	3	5	5	27
3	4	4	5	3	2	21
4	5	5	4	5	3	26
3	4	4	3	4	4	22
4	4	5	3	3	5	24
3	4	4	3	3	5	22
3	3	3	4	3	4	20
3	4	4	4	4	4	23
4	3	3	3	3	4	20
3	3	4	4	4	4	22
3	4	4	5	3	5	24
2	4	4	4	4	5	23
3	4	4	4	4	4	23
2	5	5	5	5	5	27
2	4	3	4	5	3	21
2	4	5	4	4	1	20
3	4	5	4	5	5	26

2	5	4	5	5	3	24
3	5	5	5	5	3	26
2	5	5	5	5	3	25
3	5	5	5	5	5	28
3	5	5	3	5	4	25
2	4	3	4	4	5	22
2	5	5	3	5	3	23
2	3	4	4	3	5	21
2	3	3	3	4	3	18
2	5	5	4	4	5	25
3	5	5	3	3	5	24

LAMPIRAN 3**HASIL STATISTIK DESKRIPTIF****KESADARAN WAJIB PAJAK (X₁)****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	83	2,000	5,000	3,68675	,763939
X1.2	83	2,000	5,000	3,69880	,865813
X1.3	83	2,000	5,000	3,77108	,831180
X1.4	83	2,000	5,000	3,59036	,897641
X1.5	83	3,000	5,000	4,03614	,739904
X1.6	83	2,000	5,000	3,40964	,796886
X1.7	83	2,000	5,000	3,43373	,843812
X1.8	83	1,000	5,000	2,97590	1,058945
Kesadaran Wajib Pajak	83	23,000	38,000	28,60241	2,704737
Valid N (listwise)	83				

TINGKAT PENDIDIKAN (X₂)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	83	2,000	5,000	3,28916	,819431
X2.2	83	2,000	5,000	3,50602	,874761
X2.3	83	2,000	5,000	3,59036	,855914
X2.4	83	2,000	5,000	3,45783	,940954
X2.5	83	2,000	5,000	3,71084	,789104
X2.6	83	2,000	5,000	3,62651	,836818
Tingkat Pendidikan	83	16,000	28,000	21,18072	2,353744
Valid N (listwise)	83				

PENDAPATAN (X₃)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	83	1,000	5,000	3,44578	,873080
X3.2	83	1,000	5,000	3,46988	1,028109
X3.3	83	1,000	5,000	3,51807	1,130092
X3.4	83	1,000	5,000	3,30120	1,056166
X3.5	83	1,000	5,000	3,66265	1,150579
X3.6	83	1,000	5,000	3,85542	,976961
Pendapatan	83	14,000	26,000	21,25301	2,836364
Valid N (listwise)	83				

NORMA SOSIAL (X₄)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X4.1	83	2,000	5,000	3,84337	,862242
X4.2	83	1,000	5,000	3,31325	,974401
X4.3	83	1,000	5,000	3,69880	,971985
X4.4	83	1,000	5,000	3,26506	1,116226
X4.5	83	1,000	5,000	3,15663	1,152748
X4.6	83	2,000	5,000	3,66265	1,096303
Norma Sosial	83	13,000	27,000	20,93976	2,751272
Valid N (listwise)	83				

SANKSI PAJAK (X₅)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X5.1	83	2,000	5,000	3,72289	,801116
X5.2	83	2,000	5,000	3,03614	,993218
X5.3	83	2,000	5,000	3,08434	,829411
X5.4	83	2,000	5,000	3,74699	,824079
X5.5	83	3,000	5,000	3,86747	,676632
X5.6	83	2,000	5,000	3,65060	,889419
Sanksi Pajak	83	16,000	28,000	21,10843	2,627305
Valid N (listwise)	83				

KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X₆)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X6.1	83	2,000	5,000	3,67470	,856943
X6.2	83	2,000	5,000	3,51807	,874593
X6.3	83	2,000	5,000	3,46988	,770450
X6.4	83	2,000	5,000	3,60241	,779927
X6.5	83	2,000	5,000	3,97590	,680314
X6.6	83	2,000	5,000	3,74699	,838747
X6.7	83	2,000	5,000	3,56627	,666128
X6.8	83	2,000	5,000	3,60241	,697378
Kepercayaan pada pemerintah	83	19,000	37,000	29,15663	3,273999
Valid N (listwise)	83				

KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Y)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	83	2,000	5,000	3,36145	,834884
Y.2	83	3,000	5,000	4,19277	,723437
Y.3	83	3,000	5,000	4,26506	,750355
Y.4	83	3,000	5,000	3,92771	,745444
Y.5	83	3,000	5,000	4,14458	,828347
Y.6	83	1,000	5,000	4,07229	1,079557
Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	83	18,000	30,000	23,96386	2,539665
Valid N (listwise)	83				

LAMPIRAN 4

HASIL UJI VALIDITAS

KESADARAN WAJIB PAJAK (X₁)

Correlations										
		X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	Kesadaran Wajib Pajak
X1. 1	Pearson Correlati on	1	,114	,039	- ,029	- ,023	,013	- ,014	- ,025	,305**
	Sig. (2- tailed)		,306	,724	,792	,837	,907	,902	,826	,005
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X1. 2	Pearson Correlati on	,114	1	,174	,467 **	,074	,146	- ,086	- ,274 *	,490**
	Sig. (2- tailed)	,306		,115	,000	,504	,189	,439	,012	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X1. 3	Pearson Correlati on	,039	,174	1	,069	,569 **	,070	- ,170	- ,048	,501**
	Sig. (2- tailed)	,724	,115		,536	,000	,532	,125	,667	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X1. 4	Pearson Correlati on	- ,029	,467 **	,069	1	- ,124	,135	- ,085	- ,203	,394**
	Sig. (2- tailed)	,792	,000	,536		,263	,223	,447	,066	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X1. 5	Pearson Correlati on	- ,023	,074	,569 **	- ,124	1	,016	,092	,141	,513**
	Sig. (2- tailed)	,837	,504	,000	,263		,886	,409	,203	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X1. 6	Pearson Correlati on	,013	,146	,070	,135	,016	1	- ,068	- ,133	,342**
	Sig. (2- tailed)	,907	,189	,532	,223	,886		,542	,232	,002
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X1. 7	Pearson Correlati on	- ,014	- ,086	- ,170	- ,085	,092	- ,068	1	,339 **	,338**

	Sig. (2-tailed)	,902	,439	,125	,447	,409	,542		,002		,002
	N	83	83	83	83	83	83	83	83		83
X1.8	Pearson Correlation	-,025	-,274*	-,048	-,203	,141	-,133	,339**	1		,320**
	Sig. (2-tailed)	,826	,012	,667	,066	,203	,232	,002			,003
	N	83	83	83	83	83	83	83	83		83
Kesada ran Waji b Paj ak	Pearson Correlation	,305**	,490**	,501**	,394**	,513**	,342**	,338**	,320**		1
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,000	,000	,000	,002	,002	,003		
	N	83	83	83	83	83	83	83	83		83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

TINGKAT PENDIDIKAN (X2)**Correlations**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Tingkat Pendidikan
X2.1	Pearson Correlation	1	,015	-,003	-,031	-,095	,017	,314**
	Sig. (2-tailed)		,896	,979	,778	,391	,878	,004
	N	83	83	83	83	83	83	83
X2.2	Pearson Correlation	,015	1	,215	-,003	,091	-,039	,470**
	Sig. (2-tailed)	,896		,051	,976	,414	,729	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X2.3	Pearson Correlation	-,003	,215	1	,130	,093	,073	,552**
	Sig. (2-tailed)	,979	,051		,243	,401	,511	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X2.4	Pearson Correlation	-,031	-,003	,130	1	,197	,158	,557**
	Sig. (2-tailed)	,778	,976	,243		,074	,154	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X2.5	Pearson Correlation	-,095	,091	,093	,197	1	-,055	,429**
	Sig. (2-tailed)	,391	,414	,401	,074		,623	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X2.6	Pearson Correlation	,017	-,039	,073	,158	-,055	1	,419**
	Sig. (2-tailed)	,878	,729	,511	,154	,623		,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
Tingkat Pendidikan	Pearson Correlation	,314**	,470**	,552**	,557**	,429**	,419**	1
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	83	83	83	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

PENDAPATAN (X₃)**Correlations**

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Pendapata n
X3.1	Pearso n Correla tion Sig. (2- tailed)	1	,117	,171	-,266*	,249*	,134	,466**
	N	83	83	83	83	83	83	83
X3.2	Pearso n Correla tion Sig. (2- tailed)	,117	1	,092	-,042	,012	-,053	,406**
	N	83	83	83	83	83	83	83
X3.3	Pearso n Correla tion Sig. (2- tailed)	,171	,092	1	-,061	,295**	-,042	,567**
	N	83	83	83	83	83	83	83
X3.4	Pearso n Correla tion Sig. (2- tailed)	-,266*	-,042	-,061	1	,004	,055	,271*
	N	83	83	83	83	83	83	83
X3.5	Pearso n Correla tion Sig. (2- tailed)	,249*	,012	,295**	,004	1	,032	,617**
	N	83	83	83	83	83	83	83
X3.6	Pearso n Correla tion Sig. (2- tailed)	,134	-,053	-,042	,055	,032	1	,383**
	N	83	83	83	83	83	83	83
Pend apata n	Pearso n Correla tion Sig. (2- tailed)	,466**	,406**	,567**	,271*	,617**	,383**	1
	N	83	83	83	83	83	83	83

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

NORMA SOSIAL (X₄)**Correlations**

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	Norma Sosial
X4.1	Pearson Correlation	1	,045	,016	,221*	-,024	-,108	,371**
	Sig. (2-tailed)		,689	,887	,045	,829	,330	,001
	N	83	83	83	83	83	83	83
X4.2	Pearson Correlation	,045	1	,114	,035	,064	-,220*	,362**
	Sig. (2-tailed)	,689		,306	,754	,563	,046	,001
	N	83	83	83	83	83	83	83
X4.3	Pearson Correlation	,016	,114	1	,187	,184	-,039	,536**
	Sig. (2-tailed)	,887	,306		,091	,096	,724	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X4.4	Pearson Correlation	,221*	,035	,187	1	,091	-,016	,585**
	Sig. (2-tailed)	,045	,754	,091		,416	,888	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X4.5	Pearson Correlation	-,024	,064	,184	,091	1	-,006	,534**
	Sig. (2-tailed)	,829	,563	,096	,416		,958	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X4.6	Pearson Correlation	-,108	-,220*	-,039	-,016	-,006	1	,264*
	Sig. (2-tailed)	,330	,046	,724	,888	,958		,016
	N	83	83	83	83	83	83	83
Norma Sosial	Pearson Correlation	,371**	,362**	,536**	,585**	,534**	,264*	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,000	,000	,016	
	N	83	83	83	83	83	83	83

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

SANKSI PAJAK (X₅)**Correlations**

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Sanksi Pajak
X5.1	Pearson Correlation	1	,135	,127	,096	,066	,153	,495**
	Sig. (2-tailed)		,222	,251	,389	,551	,166	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X5.2	Pearson Correlation	,135	1	,352**	,145	,044	,125	,629**
	Sig. (2-tailed)	,222		,001	,190	,696	,261	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X5.3	Pearson Correlation	,127	,352**	1	,210	-,088	-,026	,522**
	Sig. (2-tailed)	,251	,001		,057	,426	,818	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X5.4	Pearson Correlation	,096	,145	,210	1	,136	,194	,565**
	Sig. (2-tailed)	,389	,190	,057		,220	,079	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
X5.5	Pearson Correlation	,066	,044	-,088	,136	1	,145	,358**
	Sig. (2-tailed)	,551	,696	,426	,220		,191	,001
	N	83	83	83	83	83	83	83
X5.6	Pearson Correlation	,153	,125	-,026	,194	,145	1	,523**
	Sig. (2-tailed)	,166	,261	,818	,079	,191		,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	,495**	,629**	,522**	,565**	,358**	,523**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	,000	
	N	83	83	83	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X₆)**Correlations**

		X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X6.6	X6.7	X6.8	Kepercayaan pada pemerintah
X6.1	Pearson Correlation	1	,032	,327**	,206	,635**	,359**	,305**	,230*	,731**
	Sig. (2-tailed)		,772	,003	,062	,000	,001	,005	,037	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X6.2	Pearson Correlation	,032	1	-,040	-,088	,083	,164	-,049	-,098	,274*
	Sig. (2-tailed)	,772		,720	,431	,457	,138	,659	,378	,012
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X6.3	Pearson Correlation	,327**	-,040	1	-,152	,278*	,299**	,069	,420**	,512**
	Sig. (2-tailed)	,003	,720		,170	,011	,006	,534	,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X6.4	Pearson Correlation	,206	-,088	-,152	1	,051	-,007	,133	-,070	,254*
	Sig. (2-tailed)	,062	,431	,170		,649	,953	,229	,530	,021
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X6.5	Pearson Correlation	,635**	,083	,278*	,051	1	,395**	,380**	,468**	,752**
	Sig. (2-tailed)	,000	,457	,011	,649		,000	,000	,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X6.6	Pearson Correlation	,359**	,164	,299**	-,007	,395**	1	,129	,368**	,650**
	Sig. (2-tailed)	,001	,138	,006	,953	,000		,247	,001	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X6.7	Pearson Correlation	,305**	-,049	,069	,133	,380**	,129	1	,386**	,512**
	Sig. (2-tailed)	,005	,659	,534	,229	,000	,247		,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
X6.8	Pearson Correlation	,230*	-,098	,420**	-,070	,468**	,368**	,386**	1	,599**

Kepercayaan pada pemerintah	Sig. (2- tailed)	,037	,378	,000	,530	,000	,001	,000		,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	Pearson Correlation	,731**	,274*	,512**	,254*	,752**	,650**	,512**	,599**	1
	Sig. (2- tailed)	,000	,012	,000	,021	,000	,000	,000	,000	
	N	83	83	83	83	83	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Y.1	Pearson Correlati on	1	-,157	-,038	-,173	-,129	,147	,242*
	Sig. (2- tailed)		,156	,733	,118	,244	,186	,027
	N	83	83	83	83	83	83	83
Y.2	Pearson Correlati on	-,157	1	,691**	,207	,747**	,013	,747**
	Sig. (2- tailed)	,156		,000	,060	,000	,906	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
Y.3	Pearson Correlati on	-,038	,691**	1	,078	,487**	,021	,671**
	Sig. (2- tailed)	,733	,000		,482	,000	,849	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
Y.4	Pearson Correlati on	-,173	,207	,078	1	,215	-,039	,372**
	Sig. (2- tailed)	,118	,060	,482		,051	,727	,001
	N	83	83	83	83	83	83	83
Y.5	Pearson Correlati on	-,129	,747**	,487**	,215	1	-,107	,658**
	Sig. (2- tailed)	,244	,000	,000	,051		,334	,000

	N	83	83	83	83	83	83	83
Y.6	Pearson Correlation	,147	,013	,021	-,039	-,107	1	,437**
	Sig. (2-tailed)	,186	,906	,849	,727	,334		,000
	N	83	83	83	83	83	83	83
Kep atuhan	Pearson Correlation	,242*	,747**	,671**	,372**	,658**	,437**	1
Me mba yar	Sig. (2-tailed)	,027	,000	,000	,001	,000	,000	
Pajak	N	83	83	83	83	83	83	83
Bu mi dan								
Ban gun an								

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 5**HASIL UJI RELIABILITAS****KESADARAN WAJIB PAJAK (X₁)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,630	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	24,91566	6,639	,024	,242
X1.2	24,90361	5,771	,191	,136
X1.3	24,83133	5,752	,219	,121
X1.4	25,01205	6,207	,068	,219
X1.5	24,56627	5,810	,269	,103
X1.6	25,19277	6,475	,051	,228
X1.7	25,16867	6,483	,028	,243
X1.8	25,62651	6,603	-,075	,332

TINGKAT PENDIDIKAN (X₂)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,652	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	17,89157	5,000	-,036	,324
X2.2	17,67470	4,368	,111	,216
X2.3	17,59036	4,050	,220	,125
X2.4	17,72289	3,959	,186	,147
X2.5	17,46988	4,569	,103	,223

X2.6	17,55422	4,592	,069	,249
------	----------	-------	------	------

PENDAPATAN (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,632	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	17,80723	6,499	,176	,148
X3.2	17,78313	6,733	,048	,241
X3.3	17,73494	5,685	,201	,104
X3.4	17,95181	7,534	-,104	,358
X3.5	17,59036	5,342	,259	,041
X3.6	17,39759	6,877	,042	,244

NORMA SOSIAL (X₄)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,783	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	17,09639	6,552	,062	,168
X4.2	17,62651	6,578	,008	,212
X4.3	17,24096	5,649	,211	,040
X4.4	17,67470	5,222	,216	,013
X4.5	17,78313	5,513	,134	,097
X4.6	17,27711	7,178	-,138	,342

SANKSI PAJAK (X₅)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,862	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X5.1	17,38554	5,459	,214	,425
X5.2	18,07229	4,604	,308	,366
X5.3	18,02410	5,316	,235	,414
X5.4	17,36145	5,136	,291	,382
X5.5	17,24096	6,088	,107	,473
X5.6	17,45783	5,251	,211	,428

KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X₆)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,631	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X6.1	25,48193	7,350	,567	,522
X6.2	25,63855	9,917	,007	,692
X6.3	25,68675	8,730	,307	,605
X6.4	25,55422	10,031	,016	,679
X6.5	25,18072	7,833	,636	,521
X6.6	25,40964	7,855	,460	,559
X6.7	25,59036	8,928	,339	,598
X6.8	25,55422	8,470	,434	,573

KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Y)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,720	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	20,60241	6,120	-,089	,536
Y.2	19,77108	4,227	,571	,166
Y.3	19,69880	4,457	,451	,233
Y.4	20,03614	5,596	,084	,438
Y.5	19,81928	4,369	,403	,247
Y.6	19,89157	5,220	,013	,526

LAMPIRAN 6

HASIL UJI HIPOTESIS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,514 ^a	,264	,206	2,968523	1,872

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan pada pemerintah, Tingkat Pendidikan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Pendapatan, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	240,278	6	40,046	4,544	,001 ^b
Residual	669,722	76	8,812		
Total	910,000	82			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

b. Predictors: (Constant), Kepercayaan pada pemerintah, Tingkat Pendidikan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Pendapatan, Sanksi Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	12,761	5,886		2,168	,033					
Kesadaran Wajib Pajak	-,153	,116	-,154	-1,323	,130	,103	-,150	-,130	,718	1,393
Tingkat Pendidikan	,577	,240	,377	2,401	,019	,155	,266	,236	,394	2,541
Pendapatan	,624	,130	,577	4,785	,000	,422	,481	,471	,665	1,503
Norma Sosial	-,038	,141	,029	-,267	,090	,033	-,031	-,026	,828	1,208
Sanksi Pajak	,590	,251	,402	2,355	,021	,058	,261	,232	,333	3,007
Kepercayaan pada pemerintah	-,041	,102	,041	-,402	,079	,012	-,046	-,040	,950	1,052

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptspk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptspk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 117/DPMTSP-PNP/1.04.02/2020

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:076/ FIS/ UNIKS/ II/ 2020 Tanggal 10 Februari 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **LESTA NOFITA**
 NIM : 160412030
 Jurusan : AKUNTANSI
 FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
 Jenjang Pendidikan : S1
 Alamat : JLN. GATOT SUBROTO KM 7 TELUK KUANTAN
 Judul Penelitian : "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, NORMA SOSIAL, SANGSI PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2) DI DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
 Untuk melakukan Penelitian di : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
 Pada Tanggal : 20 Maret 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S.Sos. MM
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP 19750806 200012 1 001



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KEPALA DESA BUKIT PEDUSUNAN**

Sekretariat : Jln. Jend. Sudirman, No : ... Bukit Pedusunan, Telp : ... (29564)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 56 /SKP/BP/VII/2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Bukit Pedusunan. Menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi :

Nama : Lesta Nofita
NPM : 160412030
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

Telah melakukan penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyusun skripsi dengan judul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Pedusunan, 25 Juli 2020
Kepala Desa Bukit Pedusunan



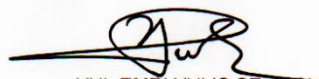
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : LESTA NOFITA
 NPM : 160412030
 PEMBIMBING I : DISKHAMARZAWENY, SE.,MM
 PEMBIMBING II : YUL EMRI YULIS, SE., M.Si
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, NORMA SOSIAL, SANKSI PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	8/1 - 2020	Revisi Bab I sesuai saran		
2.	20/2 - 2020	Revisi bab II sesuai saran konsultasi & Pb II		
3.	3/3 - 2020	Revisi s/d bab III sesuai saran		
4.	6/3 2020	perbaikan penulisan paragraf pendahuluan bab I dan bab II serta penulisan		
5.	16/3 - 2020	ACC UTK Seminar Proposal		
6.	17/3 2020	Perbaikan		
7.	23/3 2020	Perbaikan 75 sesuai		
8.	7/4 2020	ACC		
9.				
10.				

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi



YUL EMRI YULIS, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

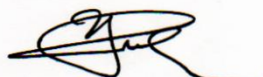
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : LESTA NOFITA
 NPM : 160412030
 PEMBIMBING I. : DISKHAMARZAWENY, SE.,MM
 PEMBIMBING II. : YUL EMRI YULIS, SE., M.Si

JUDUL SKRIPSI. : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, NORMA SOSIAL, SANKSI PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DIDESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	27/1. 2020	Revisi Hasil Penelitian Sesuai Saran		
2.	27/1 2020	Revisi Sesuai Saran.		
3.	13/2-2020	Revisi bab IV dan V sesuai Saran		
4.	24/2-2020	Revisi bab V sesuai Saran		
5.	27/2 2020	Revisi sesuai sar		
6.	25/2-2020	ACC utk ujian Skripsi		
7.	25/2 2020	acc		
8.				
9.				

Mengetahui,
 Ketua Prodi Akuntansi



YUL EMRI YULIS, SE., M.Si
 NIDN. 1014038901

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Lesta Nofita
 Tempat/Tgl Lahir : Bukit Pedusunan, 14 November 1997
 Alamat lengkap : Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan
 Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 No.telp / Wa : 0822 8846 0433
 Alamat E-Mail : lestanovita2020@gmail.com
 Pendidikan : 1. SD N 013 Bukit Pedusunan
 2. SMP N 1 Kuantan Mudik.
 3. SMK N 2 Teluk Kuantan
 4. S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial



Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik :

1. Rangking 1 Kelas 3 SD – kelas 6 SD
2. Rangking 1 Kelas 1 SMP – Kelas 2 SMP
3. Rangking 4 Kelas 3 SMK

Pengalaman

1. Magang di Kantor Camat Kuantan Mudik
2. Magang di Kantor Konsultan Pajak Lilisen Pekanbaru
3. Relawan Pajak Tahun 2019

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 6 September 2020

Penulis

Lesta Nofita